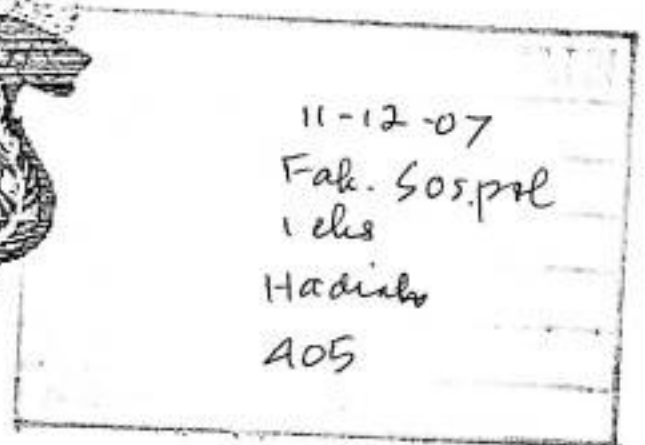


**PERANAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)
SIPAKAINGE TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN SEPEE KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Sarjana
Pada program Studi Ilmu Pemerintahan*



**FIRSAL HARING
E 121 02 003**

**JURUSAN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2007



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERANAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) SIPAKAINGE TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEPEE KECMATAN BARRU KABUPATEN BARRU

Nama Mahasiswa : FIRSAL HARING

No. Pokok : E 121 002 003

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Makassar, Desember 2007

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. A. Gau Kadir, MA
Nip. 130878514

Pembimbing II

Dr. Iedar Arifin, M.Si
Nip. 131846396

Mengetahui

Pembantu Dekan I

Dr. Muh. Kausar Bailusi, MA
Nip. 130936998



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si
Nip. 131864112

HALAMAN PENERIMAAN

Judul Skripsi : **PERANAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) SIPAKAINGE TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SEPEE KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU**

Nama Mahasiswa : **FIRSAL HARING**

No. Pokok : **E 121 02 003**

Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diterima oleh Panitia Ujian Sarjana Lengkap (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan dan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada hari Jumat, tanggal 30 November tahun 2007.

PANITIA UJIAN

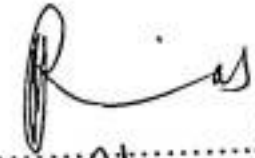
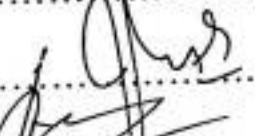



Ketua - Dr. Hasrat Arief Saleh, MS

Sekretaris - A. Murfhi, S.Sos, M.Si

Anggota - Drs. H. A. Gau Kadir, MA

- Drs. H. A. Syamsu Alam, M.Si

- Drs. A. M. Rusli, M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan taufiq dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru Kabupaten Barru” dapat diselesaikan, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberi bantuan yang sangat berarti bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Orang tua penulis Ayahanda Abd. Haring (Alm) dsan ibunda ST. Maemunah dan kakakku Harnani Haring, Ernawati, Faisal Haring, yang selalu memberi bantuan serta dukungan melalui kasih sayangnya yang tulus.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SP.BO selaku rektor UNHAS
3. Bapak Dedy Tikson Ph. D. selaku Dekan Fisipol.
4. Bapak Dr. Armin Arsyad ,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisipol.
5. Bapak Drs. A. Gau Kadir, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Indar Arifin, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sejak awal hingga penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen pada Jurusan Politik dan Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Kepada seluruh Aparat Pemerintah Kabupaten Barru khususnya pada Kantor Kelurahan Sepee yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
8. Kepada seluruh anggota Badan Keswadayaan Masyarakat Sipakainge Kelurahan Sepee, terima kasih atas bantuannya .
9. Rekan-rekan tercinta di bumi Fisip Unhas , khususnya Government 02 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya selam ini.
- 10..Rekan-rekan KKN 2007 khususnya posko Balusu (Subhan, Arra, Imel, Tuty, Uchu, Azar).
- 11 My soulmate yang tak hentihentinya memberiku semangat, cinta, serta kasih sayang.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT dapat membalas semuanya. Amin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi kemajuan keilmuan, khususnya bidang ilmu pemerintahan dan bagi pembaca.

Makassar, Desember 2007

Penulis

ABSTRAK

Firsal Haring. Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BKM Sipakainge terhadap peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan Sepee dalam pembangunan serta hubungan BKM Sipakainge dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a. Penyusunan Program Jangka Menengah dan Rencana Tahunan
- b. Penyaluran dan Pemamfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
- c. Evaluasi hasil kegiatan melalui rapat bulanan dan Rembug Warga Tahunan.

Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dengan penetapan informan sebanyak 14 orang dan teknik penelitian yang dipakai adalah purposive sampling dimana peneliti menentukan dengan anggapan sendiri terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian , kegiatan pemamfaatan proyek bantuan kelurahan khususnya proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan bantuan kelurahan lainnya yang dijalankan oleh BKM Sipakainge menekankan pelaksanaannya pada keterlibatan masyarakat sejak awal dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi dan masyarakat turut terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan BKM Sipakainge sehingga BKM Sipakainge betul-betul menjadi wadah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah untuk menciptakan kesatupaduan antara program pemerintah dengan keinginan masyarakat.

ABSTRACT

Firsal Haring. The Role of Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge to Improve the Participation of Society in Development of Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

The purpose of this research is to know the role of BKM Sipakainge to improve the participation of Sepee society in development and the relation of BKM Sipakainge in improving the society's participation through the following activities :

- a. The arrangement of short and long planning.
- b. The distribution and the use BLM
- c. The evaluation of activities result through wonthly and yearly meeting.

The research is located in Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, by using 14 informan and purposive sampling as methode of research, in this case the researcher decided what problem what will be researched.

The result of researcher that is use of poor eliminating in city project that was run by BKM Sipakainge emphasized to the participation of society in planning, applicating, and evaluating. BKM Sipakainge really be an organization that can inprove the participation of society in development. BKM also always cooperate with the government to create a unity between government program and society's wish.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	i
Halaman Persetujuan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Defenisi Operasional	13
F. Metode Penelitian	14
G. Unit Analisis	15
H. Teknik Pengumpulan Data	16
I. Teknik Analisa Data	17
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	18
B. Partisipasi	35
C. Konsep Pembangunan	46

Bab III Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

A. Batasan Wilayah	50
B. Kondisi Geografis	51
C. Keadaan Penduduk	51
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	56
E. Gambaran Umum BKM Sipakainge.....	58

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Karakteristik Responden	60
B. Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	63
C. Hubungan BKM Sipakainge dengan Pemerintah dan Lembaga Lain yang Ada di Kelurahan Sepee Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.	89

Bab V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	98

Daftar Pustaka	99
----------------------	----

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.....	52
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.....	53
Tabel 3	: Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.....	55
Tabel 4	: Distribusi Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.....	56
Tabel 5	: Distribusi Jumlah Sarana Air Bersih di Kelurahan Sepee Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.....	58
Tabel 6	: Jumlah peserta Pemilihan Anggota BKM Sipakainge	68
Tabel 5	: Realisasi Pemamfaatan Dana BLM P2KP Pembangunan Fisik.....	77
Tabel 8	: Realisasi Pemanfaatan Dana P2KP Tahap I Untuk Kegiatan Sosial	80

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Skema Kerangka Konseptual.....	13
Bagan 2	: Skema BKM Sebagai Lembaga Masyarakat.....	20
Bagan 3	: Skema Pembentukan BKM	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 32 / 2004 hasil revisi UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didukung dengan UU No. 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah memberi peluang yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan di daerahnya sendiri sesuai dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan yang ada. Pada dasarnya, undang-undang tersebut mengandung dua unsur yaitu adanya kewenangan pemerintah otonom daerah untuk mengurus pembangunan di daerahnya dan adanya orientasi kepada pembangunan yang berbasis pada aspirasi dan partisipasi masyarakat. Suasana ini membawa konsekuensi pelaksanaan pembangunan yang lebih demokratis, terbuka, dan menuntut peran serta masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Hal tersebut juga menjadi satu titik tolak transformasi sistem pemerintahan Indonesia. Sistem baru ini memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas dapat berperan secara luas untuk dapat berperan secara aktif dalam arti yang sebenarnya dalam penyelenggaraan proses pembangunan. Masyarakat sebagai pihak yang secara langsung menjadi pihak yang merasakan hasil pembangunan berkesempatan berperan sejak awal , mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya untuk kemudian menjadi pihak yang menikmatinya.

Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar didasarkan kepada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan atas pertimbangan lain.

Sesuai dengan paradigma pembangunan yang baru, perencanaan yang berlandaskan pada partisipatif bersama masyarakat menjadi kebutuhan mendasar dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan. Dimana hasil-hasil pembangunan itu sendiri ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai pihak-pihak yang terkena dampak pembangunan, maka sudah selayaknya apabila mereka dilibatkan sejak tahap awal, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pada monitoring dan evaluasinya.

Konsep partisipasi sebagai sebuah pendekatan dalam perencanaan pembangunan masyarakat sebenarnya telah muncul pada awal tahun 1980-an. Persoalannya adalah dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan makna. Partisipasi hanya digunakan sebagai label terhadap peran serta masyarakat tanpa menyentuh peran serta itu sendiri. Selama ini, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan misalnya, hanya cukup dilihat dari kehadiran yang dianggap sebagai legitimasi atas segala keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Intinya, masyarakat mau tidak mau tanpa bisa menyampaikan pendapat harus menerima program pembangunan yang belum tentu menjadi kebutuhan mereka.

Sejarah mencatat, pola-pola pembangunan sentralistik secara sistematis mampu mematikan inisiatif dan institusi masyarakat (lokal) yang ada. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya penyeragaman bentuk institusi dari atas ke bawah, dari pusat ke daerah. Berbagai institusi yang berbeda dengan yang diberlakukan, meski

memiliki basis yang kuat di tingkat masyarakat akar rumput, tidak mendapat pengakuan secara legal formal. Dominasi terpusat dari pihak luar atas segala aspek kehidupan masyarakat sedemikian kuatnya sehingga memperlemah kedudukan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Berbagai institusi yang dimaksudkan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan, pada kenyataannya lebih mengutamakan kepentingan pemilik proyek, tanpa memili tanggung jawab moral yang kuat terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri. Singkatnya institusi bentukan tersebut baru merupakan sebatas organ proyek dan belum berwujud menjadi institusi yang benar-benar menjadi tumpuan aspirasi, inisiatif, partisipasi, maupun kontrol masyarakat terhadap penanganan dan pembangunan wilayahnya.

Sejak masa reformasi dimulai, banyak upaya dari berbagai pihak untuk memulihkan kembali kedudukan dan peran masyarakat dalam tatanan berbangsa dan bernegara serta menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance). Upaya-upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun masyarakat warga (civil society) sebagai jawaban atas lemahnya atau ketidakberdayaan masyarakat, lunturnya solidaritas dan kesatuan serta hilangnya kedaulatan rakyat secara nyata dalam pembangunan bangsa dan negara.

Konsep pembangunan tersebut telah diupayakan pemerintah melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang ditangani oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.. P2KP merupakan proyek pemerintah yang berupaya memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan

lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, untuk membangun “gerakan kemitraan” dan menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan sasaran.

Tujuan P2KP adalah membantu mengembangkan sumber daya masyarakat dengan cara meningkatkan keberdayaan institusi masyarakat ditingkat lokal. Pelaksanaan proyek P2KP ini dititikberatkan pada proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat agar mampu menyelesaikan persoalan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan yang ada di lingkungannya, dan salah satu prasyarat disalurkanannya dana proyek tersebut adalah terbentuknya lembaga yang menjadi kepercayaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, yang aspiratif dan akuntabel serta mampu memperkuat aspirasi / suara masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan lokal. Lembaga ini diharapkan akan mampu menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyusunan program usulan masyarakat yang akan disatupadukan dengan program pemerintah kelurahan serta kebijakan pemda setempat. Secara generik dikenal dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan masyarakat yang memadukan pelaksanaan program bantuan pemerintah khususnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan dana-dana bantuan lain yang dipercayakan kepada mereka. Dalam pelaksanaan setiap

kegiatannya, BKM yang anggota-anggotanya merupakan pribadi-pribadi yang dipercaya warga senantiasa berpedoman pada aspek-aspek demokrasi. partisipasi, transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, keadilan dan kesederhanaan. BKM bersama masyarakat menyusun usulan program-program dan prioritas pembangunan yang kemudian BKM menyampaikannya kepada pihak yang berkepentingan khususnya pada pihak pelaksana proyek P2KP dan dana-dana bantuan lainnya. Dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahap evaluasi masyarakat senantiasa dilibatkan dimana BKM yang mewadahnya.

BKM sebagai organisasi masyarakat warga pada dasarnya merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi serta partisipasi warga masyarakat kelurahan khususnya dalam pembangunan. BKM bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan perangkat kelurahan sebagai pelaksana kebijakan publik tingkat lokal diharapkan dapat menempatkan perannya sebagai fasilitator dalam mengarahkan dan menumbuhkan serta membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam menaggulangi kemiskinan melalui BKM.

BKM dan pemerintah daerah diharapkan dapat merintis dan mewujudkan gerakan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan dengan cara memberi peluang bagi kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan dan pembangunan daerah dan dapat lebih berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat (pendekatan pembangunan partisipatif). Adanya kesatupaduan antara

peran BKM dengan pemerintah kelurahan diharapkan dapat membawa pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun dan menumbuhkan daerahnya sendiri.

Seperti halnya di kelurahan Sepee kecamatan Barru kabupaten Barru yang menjadi salah satu sasaran P2KP, dengan berdasarkan hasil kajian masyarakat serta pemerintah setempat, disimpulkan bahwa lembaga yang ada selama ini kurang berfungsi atau tidak mampu mengaspirasikan keinginan masyarakat khususnya masyarakat miskin sehingga pelaksanaan proyek pembangunan di kelurahan Sepee umumnya tidak berjalan efektif terlebih lagi menyangkut masalah penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sepe'E belum mampu ditanggulangi secara keseluruhan. Didukung dengan kenyataan bahwa lembaga yang ada selama ini mengalami kevakuman sehingga lembaga tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari proses partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan masyarakat, bahwa sudah waktunya lembaga baru dibentuk dengan mekanisme keterlibatan masyarakat secara keseluruhan dengan tidak membedakan status dan tingkatan atau golongan. Akhirnya masyarakat memutuskan untuk membentuk lembaga baru dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge. Kehadiran BKM Sipakainge di wilayah Kelurahan SepeE merupakan lembaga baru yang sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar, yang merupakan prasyarat bagi pelaksanaan P2KP di kelurahan sasaran, tidak dimaksudkan sebagai upaya memobilisasi masyarakat untuk

kepentingan pihak luar atau kepentingan kelompok tertentu melainkan untuk kepentingan masyarakat secara luas artinya menumbuhnya kesadaran kritis dan kebutuhan bersinergi masyarakat.

Namun pertanyaan yang kemudian muncul apakah lembaga ini kemudian betul-betul dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat khususnya sekaitan dengan perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam menanggulangi persoalan bersama untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian apakah BKM dapat betul-betul menjadi institusi yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan dengan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagaimana yang tercantum dalam konsep pembangunan yang akan digalakkan pemerintah melalui P2KP.

Atas dasar pemikiran demikian maka penulis yang merupakan juga salah seorang penduduk yang berdomisili di kelurahan Sepee merasa tertarik untuk menjadikannya pokok penelitian dan bahasan pada skripsi ini dengan lebih menitik beratkan pada peran BKM Sipakainge terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk membahas tentang Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Sepee

Kecamatan Barru, adapun rumusan masalah yang menjadi perhatian penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BKM Sipakainge terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Sepee. Dalam hal ini tolak ukur peranan BKM Sipakainge penulis teliti selama kurun waktu dua tahun 2 (dua) tahun masa jabatan BKM Sipakainge yaitu sejak terbentuknya BKM Sipakainge (24 Maret 2005) sampai dengan berakhirnya masa jabatan BKM Sipakainge periode 2005/2007 pada tanggal 24 Maret 2007. Apakah selama kurun waktu tersebut BKM Sipakainge mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kelurahan Sepee dalam pembangunan.
2. Bagaimana hubungan BKM Sipakainge dengan pemerintah kelurahan dan lembaga lain yang ada di kelurahan Sepee dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian yang dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Sepee .

- b. Untuk mengetahui hubungan BKM Sipakainge dengan pemerintah kelurahan dan lembaga lain yang ada di kelurahan Sepee dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Sepee.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil-hasil penelitian nantinya diharapkan dapat berguna dan bermamfaat untuk:

- a. Manfaat akademik berupa memberikan gambaran tentang peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Sepee yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis untuk disosialisasikan di lapangan.
- b. Manfaat praktis adalah dapat memberikan informasi dan bahan masukan bagi penulis dan para Pimpinan Kolektif BKM Sipakainge, Aparat Pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Sepee sebagai salah satu bahan evaluasi bagi kinerja BKM Sipakainge sendiri dan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah kelurahan Sepee dan masyarakat kelurahan Sepee.

D. Kerangka Konseptual

1. Badan Keswadayaan Masyarakat

Badan Keswadayaan Masyarakat adalah lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya

warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan.

Keputusan dalam lembaga dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM, dimana musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. BKM sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas BKM

1. Merumuskan kebijakan-kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan dana Bantuan Langsung Masyarakat.
2. Menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan diwilayahnya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
3. Mengorganisasi dan mensinergikan potensi dan kekuatan masyarakat bagi optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan diwilayahnya.
4. Melembagakan nilai-nilai universal dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kehidupanbermasyarakat di wilayahnya.
5. Memonitoring pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang ditetapkan BKM dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan membangun kontrol sosial masyarakat
6. Membangun kepercayaan pihak luar untuk dapat menjalin kerjasama dan kemitraan.



2. Fungsi BKM

- 1) Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan
- 2) Pusat pengembangan aturan dan kode etik
- 3) Pusat pengambilan keputusan yang jujur, transparansi dan akuntabel.
- 4) Pusat aspirasi dan partisipasi masyarakat
- 5) Pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan
- 6) Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan pemerintah setempat.

b. Partisipasi

“Bintoro Tjokroamidjojo” mengemukakan bahwa partisipasi adalah suatu kegiatan masyarakat yang dapat diselenggarakan atas dasar kesukarelaan tetapi juga sering kali karena pola kekuasaan dan iklim tradisional kemasyarakatan dipakai juga sebagai alat mobilisasi yaitu gotong royong. Pada dasarnya gotong royong tersebut adalah berdasarkan kesukarelaan saling membantu bekerja untuk suatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan sebagai anggota satau kepentingan seluruh anggota.

Partisipasi dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :

1. Partisipasi non fisik, seperti memberikan saran, usul, masukan dan sanggahan dalam kegiatan rapat atau pertemuan yang menyangkut tentang program pembangunan yang akan dijalankan.

2. Partisipasi fisik, seperti ikut menyumbangkan tenaga untuk kerja bakti atau gotong royong .
3. Partisipasi dana
4. Partisipasi barang
5. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

c. Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarakat yang artinya kelompok bersama, hidup bersama dengan saling mempengaruhi. Menurut Aguste Conte :

“Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri, manusia diikat dalam kehidupan kaelompok karena rasa sosial dan merata dengan kebutuhannya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang hidup berkelompok menurut hukum pada suatu tempat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya

d. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki nasib bangsa. Dan oleh sebab itu dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo : Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu

kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Rangkaian proses yang dimaksud meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembangunan.

Berikut ini penulis akan merumuskan suatu konsep yang akan melandasi kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini

Skema Kerangka Konseptual



E. Defenisi Operasional

BKM adalah lembaga masyarakat yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang merupakan dana bantuan pemerintah dibawah naungan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Sebagai lembaga masyarakat yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut hendaknya dalam pelaksanaan kegiatannya senantiasa berpedoman pada prinsip partisipasi aktif masyarakat baik pada saat perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi dan penilaian hasil kegiatan. Semua proses tersebut hendaknya melibatkan masyarakat. BKM dilengkapi dengan peran dan fungsi sebagai berikut

a. Peran BKM

1. Motor penggerak dalam melembagakan nilai-nilai luhur dan prinsip kemasyarakatan.
2. Mengorganisasikan dan sinergi potensi warga
3. Melembagakan proses pengambilan keputusan yang adil
4. Membangun dan menumbuhkembangkan relawan-relawan warga
5. Motor penggerak dalam menumbuhkan semangat partisipasi warga dalam pembangunan .

b. Fungsi BKM

1. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan
2. Pusat pengembangan aturan dan kode etik
3. Pusat pengambilan keputusan dan kebijakan yang adil,jujur,transparan,akuntabel,dan demokratis.
4. Pusat aspirasi dan partisipasi masyarakat
5. Pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan
6. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan pemerintah setempat.

F. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barru, yakni kelurahan Sepee kecamatan Barru Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian selama dua bulan yaitu bulan Maret sampai dengan April 2007.

b. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif menggambarkan secara umum tentang objek yang diteliti, terutama tentang peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan Sepee.

c. Informan

1). Informan yang dimaksud adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran pengumpulan data, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- Informan dari BKM Sipakainge : 13 orang anggota
- Unit Pengelola BKM Sipakainge : 4 orang
- Informan dari masyarakat : 20 orang
- Informan dari aparat kelurahan : 2 orang

2). Penentuan informan

Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, maksudnya peneliti menentukan informan dengan anggapan atau pendapat sendiri sebagai sampel penelitian dengan melihat jumlah objek penelitian yang ada di lokasi.

G. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yakni anggota BKM itu sendiri beserta unit pengelolanya di kelurahan Sepee.

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data sekunder dan data primer dilakukan studi pustaka dan study lapang dan dalam kedua studi tersebut digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi pustaka (Library Research)

Dalam study pustaka ini penulis berusaha menelaah berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku-buku, majalah, surat kabar, undang-undang, buku-buku serta dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

2. Studi lapang (Field Research)

Studi lapang dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Dalam study lapang digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, guna mencatat dan mengamati program yang telah dilakukan oleh BKM Sipakainge yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Wawancara

Yaitu dimana penulis mengadakan tanya jawab kepada sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara memperoleh data dengan sejumlah dokumentasi yang berasal dari lembaga terkait di kelurahan Sepee yakni BKM Sipakainge.

d. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian lapangan, melalui observasi dan wawancara yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai yang diteliti.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada baik pada Sekretariat Badan Keswadyaan Masyarakat Kelurahan Sepee Kecamatan Barru Kabupaten Barru maupun yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

I. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa deskriptif, kualitatif, yaitu menganalisa data-data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

1. *Pengertian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)*

BKM adalah singkatan dari Badan Keswadayaan Masyarakat. BKM merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat warga yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria-kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama yang dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan. Keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM dimana musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Konsep lembaga masyarakat dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat lahir sejalan dengan konsep Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang merupakan proyek bantuan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Bank Dunia yang kemudian ditangani oleh Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Yang dimaksud dengan masyarakat warga dalam hal ini adalah terjemahan umum dari *civil society* yang secara konseptual dapat diuraikan sebagai berikut : *Civil society* adalah himpunan masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama, dengan tetap

menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya terhadap institusi negara, keluarga, agama serta pasar. (saad Eddin Ibrahim : Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996)

Berdasarkan konsep civil society diatas dapat diuraikan tentang ciri utama dari suatu masyarakat warga adalah :

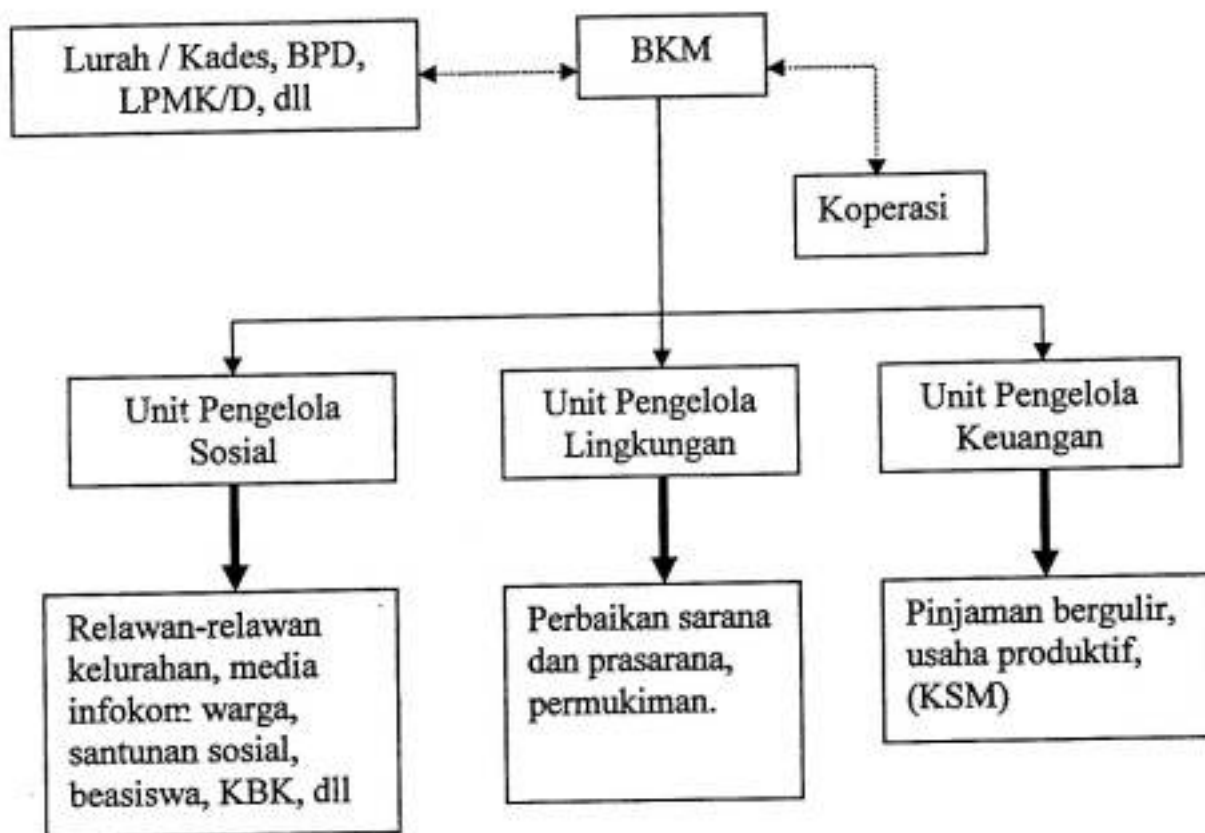
- a. Adanya kesetaraan, masyarakat terbentuk sebagai himpunan warga yang setara.
- b. Tiap anggota berhimpun secara proaktif
- c. Membangun semangat saling percaya
- d. Bekerjasama dalam kemitraan
- e. Secara damai memperjuangkan berbagai hal yan menuju perbaikan kesejahteraan bersama
- f. Bersikap menghargai keberagaman
- g. Menjunjung nilai demokrasi
- h. Selalu mempertahankan kemerdekaan dari pengaruh kepentingan
- i. Mampu bekerja secara mandiri.

Posisi himpunan warga berada diluar institusi militer, pemerintah, agama , pekerjaan, dan keluarga.

Dari gambaran diatas jelas BKM merupakan lembaga masyarakat warga yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik

masyarakat. Berikut ini adalah skema yang menggambarkan bagaimana BKM mencerminkan sebagai lembaga masyarakat :

Skema BKM sebagai lembaga masyarakat



Keterangan : Garis perintah : \longleftrightarrow
 Garis kemitraan : \dashrightarrow
 Garis fasilitasi : \longleftrightarrow

2. Tugas dan Fungsi BKM

a. Tugas BKM

- a) Merumuskan kebijakan-kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP khususnya, dan penanggulangan kemiskinan umumnya.

- b) Menyusun rencana program penanggulangan kemiskinan diwilayahnya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- c) Mengorganisasi dan mensinergikan potensi dan kekuatan masyarakat bagi optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan diwilayahnya.
- d) Melembagakan nilai-nilai universal dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan kehidupan bermasyarakat di wilayahnya.
- e) Memonitoring pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang ditetapkan BKM dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan membangun kontrol sosial masyarakat
- f) Membangun kepercayaan pihak luar untuk dapat menjalin kerjasama dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugasnya BKM mendapatkan pendampingan dari fasilitator yang telah dibentuk oleh tim konsultan yang ditunjuk oleh penyelenggara program P2KP yaitu Direktorat Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

b. Fungsi BKM

- a) Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan
- b) Pusat pengembangan aturan dan kode etik
- c) Pusat pengambilan keputusan yang jujur, transparansi dan akuntabel.
- d) Pusat aspirasi dan partisipasi masyarakat

- e) Pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan
- f) Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan pemerintah setempat.

3. Proses Pembentukan BKM

Pembentukan BKM itu sendiri melalui proses kegiatan sebagai berikut:

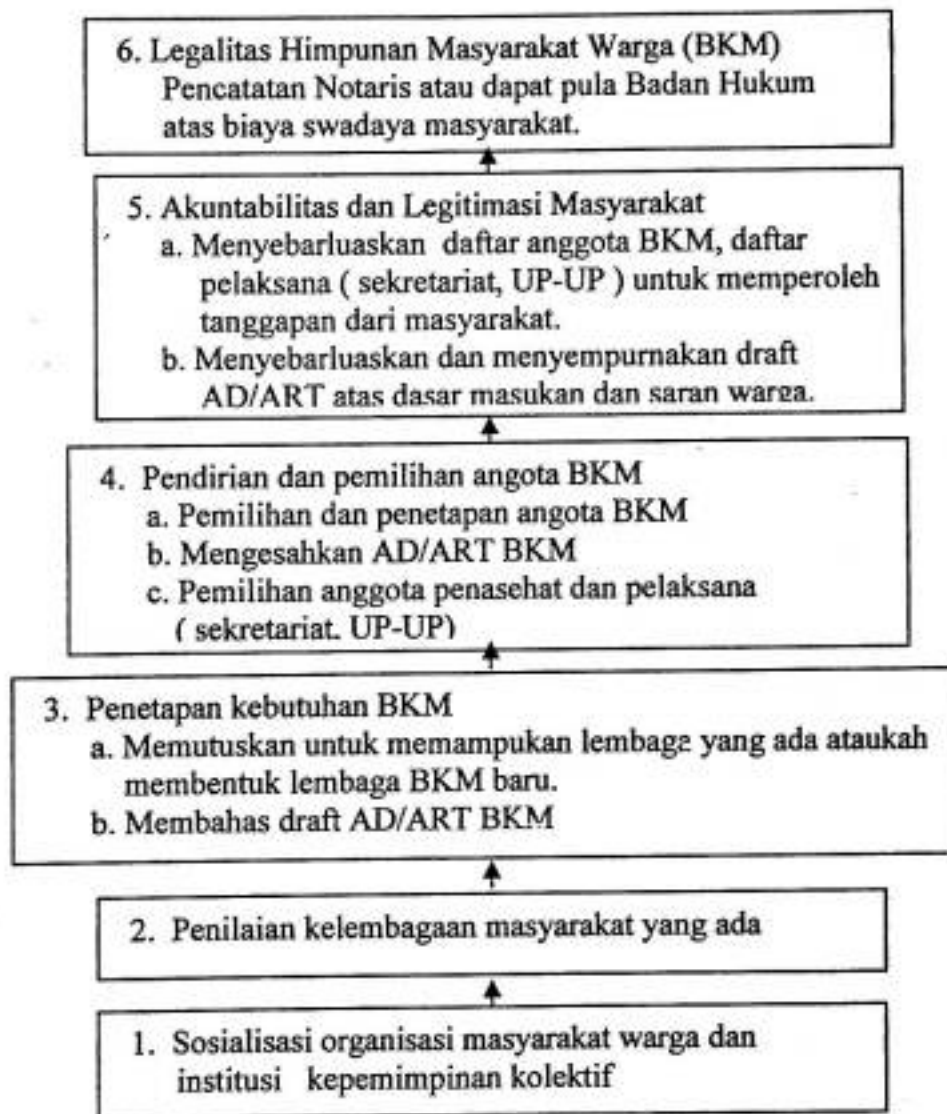
- a. Masyarakat melakukan serangkaian kegiatan rembuk untuk membahas karakteristik dan ciri organisasi yang benar-benar mampu memperjuangkan suara,kepentingan dan kebutuhan warga khususnya yang mampu menangani P2KP dan dana-dana proyek bantuan lain.
- b. Masyarakat mengadakan pengamatan terhadap lembaga-lembaga yang ada (LKMD,BPD,LPM,LSM dll) apakah lembaga tersebut sesuai dengan ciri dan karakteristik BKM. Selanjutnya diputuskan untuk membentuk lembaga baru (BKM) atau memampukan/mempfungsikan lembaga yang ada sebagai BKM jika lembaga tersebut memenuhi persyaratan sebagai BKM.
- c. Jika masyarakat memutuskan untuk membentuk BKM maka diadakan pertemuan bersama seluruh wakil-wakil masyarakat dari RT/RW,tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan setempat untuk menetapkan jadwal serta mekanisme pembentukan BKM.
- d. Masyarakat di tingkat RT/RW mengadakan pertemuan dengan melibatkan semua komponen masyarakat untuk memilih utusan mereka dalam rapat

pembentukan BKM ditingkat kelurahan. Tiap RT/RW masing-masing dipilih 13 atau 9 orang untuk mewakili RT/RW ditingkat kelurahan pada pemilihan anggota BKM.

- e. Selanjutnya dilakukan rapat pembentukan BKM ditingkat kelurahan dengan dihadiri oleh seluruh wakil-wakil utusan RT/RW yang terpilih yang sekaligus sebagai peserta rapat. Wakil-wakil utusan RT/RW yang telah dipilih masyarakat memiliki hak suara. Dalam hal ini peserta rapat menulis beberapa nama yang dipilihnya (3 nama) yang dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi anggota BKM. Nama yang memperoleh suara terbanyak hingga mencapai jumlah anggota BKM yang disepakati (9-13 orang) ditetapkan sebagai anggota BKM.
- f. Dalam hal masyarakat setempat memutuskan untuk memfungsikan lembaga yang ada sebagai BKM, fasilitator dan masyarakat melakukan penilaian terhadap anggota dari lembaga tersebut apakah anggota dari lembaga tersebut telah dipilih melalui proses demokratis, partisipatif, akuntabel dan inklusif atau harus dipilih ulang sesuai ketentuan P2KP.
- g. Hasil keputusan rapat pembentukan BKM disebarluaskan kepada masyarakat.
- h. BKM menyusun AD/ART dan membentuk unit – unit pengelola yaitu unit pengelola keuangan, unit pengelola lingkungan, unit pengelola sosial, dan

sekretariat. Pembentukan unit pengelola ini melalui tahap seleksi oleh anggota BKM.

Bagan Proses Pembentukan BKM



4. Kedudukan BKM

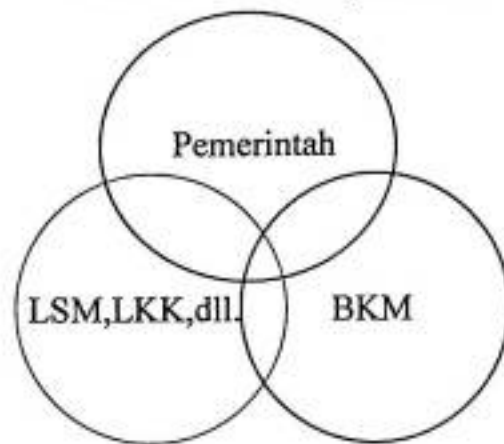
BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat kelurahan desa yang mengendalikan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Posisinya di luar pemerintah ,militer,agama,pekerjaan,keluarga. Dengan demikian BKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari masyarakat yang dibentuk bukan oleh

pemerintah atau perundangan. Dasar pembentukan BKM mengacu pada Pedoman Umum P2KP pada Bab III bagian b. Ketentuan Umum point 2) Tentang Kelembagaan Masyarakat yang harus dibangun warga dalam P2KP yang disusun oleh Tim P2KP Direktorat Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia.

Mengenai kedudukan serta hubungan BKM dengan perangkat kelurahan dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat kelurahan tidak bersifat struktural formal melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lain. BKM memiliki perbedaan dengan organisasi lain yang ada di desa dan kelurahan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) BPD maupun LKMD dibentuk oleh pemerintah melalui perundang-undangan dan kedua lembaga ini merupakan bagian dari struktur pemerintahan sedangkan BKM dibentuk atas prakarsa masyarakat sendiri dan diluar daripada struktur pemerintah desa atau kelurahan. Demikian halnya BKM dengan LSM memiliki perbedaan. Jika BKM dibentuk atas prakarsa masyarakat dan melibatkan seluruh masyarakat di desa dan kelurahan mulai dari tingkat paling bawah (RT) sampai pada tingkat atas (kelurahan), sedangkan LSM dibentuk hanya sekelompok orang saja dengan kepentingan tertentu. Berikut ini adalah gambar hubungan BKM dengan perangkat kelurahan dan organisasi masyarakat formal lainnya.



Gambaran umum posisi BKM



5. *Legalitas BKM*

BKM diresmikan melalui pencatatan pada seorang notaris atau bila dikehendaki dapat sampai mendapatkan status badan hukum melalui pengesahan kantor kehakiman. Yang perlu diperhatikan dalam proses legalisasi adalah apa yang dilegalisasi. Dalam hal ini yang dilegalisasi adalah organisasi masyarakat warga dalam bentuk paguyuban atau himpunan warga kelurahan yang bersangkutan, dimana BKM berkedudukan sebagai lembaga pimpinan kolektif yang terpilih dan mendapatkan mandat untuk memimpin dan mewakili paguyuban atau himpunan warga tersebut.

6. *Tata Kelembagaan BKM*

a. Rapat Anggota BKM

Adalah forum dari anggota-anggota BKM terpilih untuk mengambil keputusan dan atau menetapkan kebijakan-kebijakan BKM dalam pelaksanaan kegiatan P2KP khususnya dan program pembangunan lainnya.

b. Sekretariat

Merupakan pelaksana administrasi sehari-hari BKM.

c. Penasehat

Disamping sekretariat bila dikehendaki BKM berhak mengangkat penasehat sesuai kebutuhan yang bersifat relawan.

7. Misi BKM

Membangun modal sosial dengan menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan sosial dan menggalang solidaritas sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan bersama yang pada gilirannya diharapkan memperkuat kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani.

8. Kriteria BKM

Prakarsa pembentukan BKM ditentukan oleh masyarakat dimana wilayah cakupannya meliputi seluruh masyarakat kelurahan /desa. Kepemimpinan bersifat kolektif berbasis nilai-nilai kemanusiaan dimana pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh seseorang tetapi oleh seluruh anggota dan atau sebagian besar anggota. Anggota dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis, rahasia, tanpa pencalonan dan tanpa kampanye.

9. Peserta pemilihan BKM

Semua warga masyarakat yang telah dewasa menurut kriteria yang telah ditetapkan mempunyai hak untuk memilih. Jumlah warga yang berpartisipasi dalam pemilihan calon anggota BKM atau utusan warga adalah

sekurang-kurangnya 30% dari jumlah penduduk kelurahan/desa. Semua warga masyarakat yang memenuhi kriteria kemanusiaan yang ditentukan oleh masyarakat berhak dipilih, tidak berdasarkan status jabatan, golongan dan lainnya. Kriteria anggota BKM yang akan dipilih sebagaimana yang dimaksud tersebut ditetapkan melalui diskusi kelompok terarah oleh masyarakat untuk merumuskan kriteria seseorang yang dapat dijadikan anggota BKM.

10. Jumlah anggota BKM

Jumlah anggota BKM sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 13 orang dengan ketentuan harus ganjil. Jumlah anggota harus ganjil agar mempermudah proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara apabila musyawarah tidak tercapai. Jumlah anggota BKM ditetapkan sendiri oleh masyarakat.

11. Keanggotaan BKM

Pada dasarnya anggota BKM adalah dipilih oleh warga setempat dengan kriteria yang dapat dipercaya, jujur, adil, rendah hati. Tidak ada perwakilan golongan, wilayah atau kepentingan-kepentingan. Sifat-sifat baik manusia dapat dilihat dari perbuatan sehari-hari sehingga tidak mungkin dilakukan pencalonan dan kampanye.

12. Masa pengabdian anggota BKM

Masa pengabdian 2 tahun. Setiap tahun dievaluasi berdasarkan indikator perbuatan baik serta kualitas sifat-sifat kemanusiaan. Bulan ke 23 masyarakat melakukan proses pemilihan ulang.

13. Unit Pengelola BKM

BKM memiliki unit pengelola antara lain :

a. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK bertugas melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangannya baik dari dana P2KP maupun dari pihak-pihak lain.

b. Unit Pengelola Fisik Lingkungan (UPL)

UPL bertugas sebagai unit yang mengelola kegiatan dibidang pembangunan lingkungan khususnya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.

c. Unit Pengelola Sosial (UPS)

UPS bertugas mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial.

d. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelaksana administrasi kegiatan sehari-hari BKM.

Unit pengelola disamping disamping melaksanakan kebijakan – kebijakan BKM yang dilimpahkan kepadanya, juga melaksanakan tugas pendampingan terhadap Kelompok –Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan mitra dari BKM.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama dimana mereka mempunyai minat serta tujuan yang sama dalam mengatasi berbagai persoalan yang sama baik menyangkut lingkungan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, persoalan sosial maupun pengembangan usaha dan modal bagi anggotanya. Posisinya independen dalam arti bukan sebagai bawahan BKM. KSM merupakan pelaku langsung dalam pemamfaatan dana bantuan langsung masyarakat khususnya P2KP dan BKM memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap kegiatan KSM.

14. Kegiatan BKM

Kegiatan Badan Keswadayaan Masyarakat meliputi pemamfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang merupakan program bantuan pemerintah melalui Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswail) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang dikelola oleh lembaga kepercayaan masyarakat yaitu BKM yang pengelolaannya menuntut peran

serta dan partisipasi atau swadya masyarakat. Rangkaian kegiatan BKM secara umum yaitu :

- a. Perencanaan melalui kegiatan Penyusunan Program Jangka Menengah dan Penyusunan skala prioritas pembangunan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan awal BKM bersama relawan-relawan, masyarakat serta pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat untuk bersama-sama merencanakan langkah-langkah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya penanggulangan kemiskinan yang dibiayai melalui pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).. Dalam hal ini BKM diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat kelurahan setempat untuk menyampaikan aspirasinya, memberikan masukan, saran, usulan dan inisiatif-inisiatifnya. BKM akan memfasilitasi proses pelaksanaan dimasyarakat untuk menjamin bahwa proses penyusunan PJM dilakukan secara partisipatif serta benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata. Ruang lingkup kegiatan dalam PJM mencerminkan kegiatan yang benar-benar merupakan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat, baik itu pembangunan prasarana/sarana perumahan dan pemukiman. penciptaan lapangan kerja baru, kredit mikro untuk usaha kecil, hingga santunan bagi masyarakat rentan atau pelayanan sosial lain. PJM yang disusun tidak boleh semata-mata dipandang sebagai prasyarat untuk memperoleh dana BLM P2KP namun PJM berisikan uraian program masyarakat secara menyeluruh

termasuk dengan sumber-sumber dana lainnya yang dibutuhkan baik yang berasal dari swadaya masyarakat, APBD, ataupun Chaneling dengan sektor perbankan dan swasta.

- b. Pelaksanaan, yaitu pemamfaatan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP. Kegiatan penyaluran dana BLM ini dilakukan oleh unit-unit pengelola BKM. Pemamfaatan dana BLM berdasarkan pada PJM yang telah disusun bersama oleh BKM dan masyarakat serta pemerintah setempat dengan memperhatikan aspek pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- c. Evaluasi ,melalui kegiatan rapat bulanan dan rapat triwulan BKM serta Rembug Warga Tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BKM oleh masyarakat. Sebagai bahan evaluasi dan kontrol daripada BKM itu sendiri memiliki mekanisme pelaporan terhadap penggunaan dana batuan yang diterima yaitu penyebarluasan konsep program, kebijakan, keputusan, kegiatan – kegiatan, dana yang diperoleh serta pemanfaatan dana tersebut. Semua disampaikan secara terbuka melalui papan informasi, Rapat bulanan dan triwulan BKM, penyampaian hasil rapat kepada RT, Lurah, fasilitator, konsultan dan penanggungjawab operasional P2KP di tingkat kecamatan, serta setiap tahunnya BKM melakukan audit oleh auditor indefenden dan menyebarluaskan hasil auditnya ke semua pihak terkait.

Secara khusus BKM memiliki program kegiatan sebagai berikut :

a. Organisasi

1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Miskin
2. Mendorong anggota BKM maupun Unit Pengelola agar lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan masyarakat
3. Mengikut sertakan Anggota BKM maupun Unit Pengelola dalam pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi.
4. Menjalin hubungan kemitraan pada mitra baik instansi pemerintah maupun lembaga lain baik dalam rangka menanggulangi kemiskinan di wilayah kerja masing – masing maupun dalam hal peningkatan pembangunan dan pengelolaan serta pemamfaatan potensi sumber daya yang ada untuk pembangunan.
5. Memberikan insentif yang permanent kepada Unit Pengelola Keuangan sesuai dengan bidang dan kapasitas kerja yang dimilikinya.
6. Melakukan pelatihan dan pembinaan yang lebih insentif kepada anggota KSM baik dalam bentuk pembukuan maupun dalam pembinaan kelompok.

b. Ekonomi

1. Memanfaatkan sarana sekretariat baik untuk kepentingan lembaga maupun kepentingan Masyarakat.

2. Pelaksanaan kegiatan pengurus akan dilakukan secara professional berdasarkan uraian tugas.
3. Melakukan Rapat BKM setiap Bulan dan Rapat BKM dan KSM setiap 1 Kali dalam 3 bulan.
4. Melakukan Audit Penggunaan Dana yang diterima dari P2KP
5. Melakukan persiapan kunjungan Bank Dunia ke lokasi BKM .

c. Administrasi.

Menata sistem Administrasi UPK (Unit Pengelola Keuangan) dan Sekretariat secara professional khususnya pembayaran KSM yang dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu dan menerapkan sanksi bagi yang tidak memenuhi aturan.

d. Permodalan.

1. Melakukan pemupukan Modal sendiri dari Anggota KSM seperti Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan simpanan – simpanan lainnya yang tidak memberatkan Anggota dan masyarakat Kelurahan Sepee.
2. Mengusahakan modal dari Luar yang bersumber dari Pemerintah atau chaneling lainnya.

e. Bidang Pembangunan Sarana Fisik

Membangunan sarana fisik berdasarkan usulan masyarakat melalui penyusunan Program Jangka Menengah dengan memanfaatkan dana stimulan P2KP serta yang bersumber dari Dana Sukarela Masyarakat.

f. Bidang Sosial

1. Memberikan dan melayani Kebutuhan Penyandang Cacat, jompo, beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta bantuan perbaikan rumah terhadap kepala keluarga yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak mampu dengan memberikan sumbangan.
2. Mengadakan pendataan kembali terhadap KK Miskin sebagai dasar dan pedoman dalam pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat yang tepat sasaran.

g. Unit Pengaduan Masyarakat (PM)

Merangkum berbagai keluhan dan pendapat masyarakat terhadap kinerja BKM maupun Unit Pengelola.

B. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan suatu istilah yang sangat populer terutama bagi negara yang berkembang atau negara yang sedang membangun, karena istilah sering dikaitkan dengan pembangunan. Pengertian partisipasi oleh banyak kalangan disamakan keikutsertaan atau turut serta.

Secara etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "partisipasi" (kata benda) atau turut mengambil bagian sedang "To" partispate (kata kerja) ikut mengambil bagian.

Lebih lanjut, Drs.M. Syukur Abdullah dalam bukunya Bunga Rampai Administrasi Pembangunan mengemukakan pengertian partisipasi sebagai berikut :

“ yang dimaksud dengan partisipasi ialah sikap tanggap masyarakat lokal (local response) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang tata cara baru, pemakaian teknologi baru dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk mencapai tujuan pembangunan “.

Dari pengertian tersebut, partisipasi lebih ditekankan pada kemampuan atau kesediaan untuk berkorban dalam bentuk materi dan tenaga.

Selanjutnya Keith Davis sebagaimana yang dikutip oleh Santoso RA Sastro Poetro mengemukakan definisi partisipasi sebagai berikut :

“partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi (perasaan seseorang) dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”

Dari definisi tersebut diatas, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan bila ingin diterapkan dalam bidang pembangunan, yaitu :

- a. Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosi yang lebih banyak diharapkan terlibat dibanding fisiknya sendiri, sehingga dengan itu makna partisipasi secara sukarela menjadi jelas terbedakan dari mobilisasi;
- b. Partisipasi berarti dorongan orang untuk mendukung/menyumbang kepada situasi tertentu, sehingga berbeda dengan sikap memberi sesuatu, yang dengan demikian makna dorongan mental dan emosional lebih mendapat tempat;

- c. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggungjawab dalam suatu kegiatan karena apa yang disumbangkan itu adalah atas dasar sukarela sehingga timbul self-involve.

Dengan mengutip pengkategorian oleh Deshler dan Sock (1985), disebutkan bahwa secara garis besar terdapat 3 tipe partisipasi, yaitu : partisipasi teknis (technical participation), partisipasi semu (pseudo participation), dan partisipasi politis atau partisipasi asli (genuine participation). Partisipasi teknis dan partisipasi politis kelihatannya sepadan dengan 2 tipe partisipasi yang ditemukan dalam referensi lain, yaitu partisipasi untuk partisipasi yang digunakan dalam pengembangan program, dan partisipasi yang diperluas untuk partisipasi yang merambah ke dalam isu demokratisasi (Dalam buku : Impact Assesment for Development Agencies, Christ Roche, OXPAM-NOVIB, 1999).

a. Partisipasi Teknis

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengumpulan data, analisis data, dan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan partisipasi dalam hal ini adalah sebuah taktik untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan praktis dalam konteks pengembangan masyarakat.

b. Partisipasi asli (Partisipasi politis)

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses perubahan dengan melakukan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis, ekonomis, ilmiah, dan ideologis, secara bersamaan. Pengembangan partisipasi

dalam ini adalah pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap suatu situasi melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pilihan kegiatan dan berotonomi.

c. Partisipasi Semu

Partisipasi politis yang digunakan orang luar atau kelompok dominan (elite masyarakat) untuk kepentingannya sendiri, sedangkan masyarakat hanya sekedar obyek.

Dalam pengertian partisipasi di atas, bukan berarti partisipasi teknis tidak penting dibandingkan dengan partisipasi politis), bisa sekaligus ada dalam sebuah program pengembangan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya secara lebih luas (kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi).

d. Manipulasi/rekayasa sosial

Yaitu pendekatan yang mendudukan masyarakat sebagai obyek pembangunan dan dimanipulasi agar sesuai dengan harapan/program yang telah dirumuskan oleh pengambil keputusan (pemerintah).

e. Terapi

Yaitu pendekatan yang mendudukan masyarakat sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa (orang sakit) dan harus dipercaya terhadap apa yang diputuskan oleh pemerintah (dokter)

f. Informasi

Yaitu pendekatan pembangunan dengan pemberian informasi akan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti pemasyarakatan program, dan lain-lain.

g. Konsultasi

Yaitu pendekatan pembangunan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkonsultasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di lokasi yang bersangkutan.

h. Penenteraman

Yaitu pendekatan pembangunan dengan misalnya merekrut tokoh-tokoh masyarakat untuk duduk dalam panitia pembangunan sebagai upaya menenteramkan masyarakat tetapi keputusan tetap di tangan pemerintah.

i. Kerjasama

Pendekatan pembangunan yang mendudukan masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara sehingga keputusan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama.

j. Pendelegasian

Yaitu pendekatan pembangunan yang memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat untuk mengambil keputusan yang langsung menyangkut kehidupan mereka

k. Kontrol Sosial

Yaitu pendekatan pembangunan dimana keputusan tertinggi dan pengendalian ada di tangan masyarakat.

Artinya partisipasi baru benar-benar terjadi bila ada kadar kedaulatan rakyat yang cukup dan kadar kedaulatan rakyat tertinggi adalah terjadinya kontrol sosial .

Sedangkan partisipasi itu sendiri memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat proaktif dan bukan reaktif, artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak
- b. Ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat
- c. Ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut
- d. Ada pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Emrich (1979) memberi kejelasan konsep partisipasi dengan mengemukakan dua aksioma mengenai partisipasi yaitu:

- (a) Partisipasi harus dimulai dari lapisan yang paling bawah. Harus ada kesempatan yang riil bagi kelompok miskin untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan keputusan itu harus berhubungan dengan aspirasi penduduk desa.
- (b) Partisipasi harus terjadi pada semua tingkatan dalam proses pembangunan. Dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi dari suatu kegiatan pembangunan di pedesaan.

Lebih lanjut Emrich mengemukakan prinsip-prinsip dasar partisipasi sebagai berikut :

a. Partisipasi Penuh (Full Participation)

Proses pengambilan keputusan melibatkan seluruh pihak-pihak yang akan terlibat dan terkena program, termasuk pihak-pihak yang selama ini terabaikan.

b. Saling Pengertian (Mutual understanding)

Kesepakatan kegiatan harus bersifat awet, para pihak yang terlibat dalam kegiatan perlu menerima secara terbuka pikiran dan harapan yang berkembang dalam proses pengambilan keputusan.

c. Pemecahaan Secara Bersama (Inclusive Solution)

Solusi yang diciptakan berangkat dari proses integrasi antara perspektif dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan sehingga solusi yang diciptakan bisa sesuai dengan visi dan karakteristik para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.

d. Pembagian Tanggung Jawab (Shared Responsibility)

Kegiatan yang partisipatif ditandai dengan pembagian tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan.

e. Kendala Dalam Partisipasi

Frances F. Korten (1983) dalam studinya mengenai partisipasi menemukan tiga faktor utama yang merupakan kendala dalam pengembangan partisipasi. Yang pertama adalah kendala yang ada dalam komunitas, dan terakhir kendala yang ada dalam struktur masyarakat desa sendiri.

Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Direct participation (bertatap muka; masyarakat desa secara perseo-rangan mengungkapkan pendapat mereka, berdiskusi, mengambil suara, bekerja menawarkan dukungan materi, menerima keuntungan, pada dasarnya masyarakat mewakili dirinya sendiri).
- 2) Emi-direct participation (masyarakat mendelegasikan kepada orang lain-relasi, kawan, anggota terhormat dalam komunitas mereka untuk mewakili mereka dalam semua jenis kegiatan tetapi terus berhubungan secara bertatap muka langsung dengan wakil-wakil mereka).
- 3) Indirect participation (masyarakat desa mendelegasikan kepada orang lain-para ahli, orang yang terpilih dalam organisasi di desa, misalnya LSM, BIPP-BPP, Staf Proyek, petugas pemerintah untuk mewakili mereka dalam semua jenis kegiatan, tetapi jarang berinteraksi dengan wakil-wakil mereka secara orang per orang).

Ada beberapa kendala yang muncul secara lokal. Kendala ini pada umumnya mengenai masalah manusia sendiri, cara hidupnya, dan masyarakat dimana mereka hidup.

Faktor-faktor ini adalah bersifat sosial kultural dan karena dapat disebut kendala internal. Selain itu ada kendala yang bersifat external yang biasanya

berhubungan dengan administrator, sikap dan nilai mereka, dan cara mereka diorganisasikan untuk tugas pembangunan ditingkat desa.

Sebagai kesimpulan, Rogers dkk, mengemukakan empat alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan pedesaan yaitu:

- (a) Penduduk desa yang atau petani miskin dapat menjadi sumber ide yang baik, seperti yang berasal dari pengetahuan asli dalam bidang pertanian.
- (b) Penduduk desa dapat membantu memperbaiki gagasan-gagasan yang berasal dari luar sehingga dapat sesuai dengan kondisi setempat.
- (c) Penerima manfaat dapat bertindak sebagai peneliti dan pendidik dalam mencoba teknologi-teknologi baru di bidang pertanian untuk menguatkan kelembagaan petani.
- (d) Penduduk desa juga dapat berpartisipasi dalam keputusan bagaimana pembangunan pedesaan itu dilaksanakan sehingga kebutuhan mereka lebih ter-refleksi dalam program-program pengembangan pedesaan yang akan dilaksanakan.

Dari sisi lain Coben dan Uphof sebagaimana yang dikutip oleh Wiwik SriWidari dan kawan-kawan dalam berkala penelitian "Pasca Sarjana " UGM Jilid 9 Nomor 34 mengidentifikasi partisipasi menjadi empat keputusan, yaitu :

"Partisipasi dalam bentuk penerapan keputusan, partisipasi dalam bentuk penerapan hasil keputusan serta partisipasi dalam bentuk evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut merupakan suatu siklus."

Dengan demikian partisipasi masyarakat bukan hanya dalam bentuk pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan, tetapi partisipasi harus mulai dari perencanaan suatu kegiatan pembangunan, pelaksanaan serta tanggungjawab atas pemeliharaan hasil yang dicapai oleh pembangunan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan Taliziduhu Ndraha dimana mengatakan bahwa partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa hal yaitu :

- a. Partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi (partisipasi informatif)
- b. Partisipasi dalam memberikan tanggapan dan sara dalam terhadap informasi yang diterima baik dalam terhadap informasi yang diterima baik yang bermakna menolak, menerima dengan syarat, atau menerima sepenuhnya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operational pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan tersebut yang paling penting dalam partisipasi masyarakat adalah kesediaan dan kerelaan dan bukan paksaan atau mobilisasi masyarakat melalui kampanye dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut diatas bila dikaitkan dengan pembangunan, maka partisipasi masyarakat merupakan hal yang amat penting dan menentukan, walaupun tetap diakui peran pemerintah dalam proses pembangunan juga penting, namun hasil akhir ditentukan oleh masyarakat apakah mau menerima atau memelihara hasil pembangunan. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan pembangunan maka

partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan mutlak dalam pembangunan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan. Pembangunan tanpa partisipasi adalah hal yang mustahil.

Taliziduhu Ndraha menyatakan bahwa pembangunan desa kelurahan tidak akan berhasil apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat dan pembangunan itu tidak akan mendapatkan dukungan moril maupun materil pada tahap perencanaan maupun pada pelaksanaannya."

Pembangunan Desa/Kelurahan menuntut partisipasi aktif berupa prakarsa, swadaya dari masyarakat dan itu akan timbul apabila masyarakat sudah menyadari bahwa tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang bukan saja bertanggungjawab kepada kemaslahatan pribadinya tapi juga pada kepentingan kolektif yang menempati posisi yang paling urgen yang harus diatas kepentingan pribadi atau keluarga.

Dari rasa tanggung jawab kolektif inilah lahir rasa solidaritas yang tinggi untuk turut serta mengembangkan segala kemampuan baik pikiran pada tahapan perencanaan pembangunan, maupun materi dan fisik pada tahap pelaksanaan bahkan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dalam hubungan itu program utama yang seharusnya mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan suatu bangsa atau daerah ialah bagaimana agar masyarakat bisa lepas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

C. Konsep Pembangunan

Berbagai pengertian pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik, maupun pakar sosial. Berbagai pengertian ini pada intinya meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat secara konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu "innerwill" proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

Sebagai kata sifat, pembangunan ialah kondisi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam konteks ini, dua asumsi sekurang-kurangnya perlu diperhatikan. Pertama, bahwa kondisi yang lebih baik itu diinginkan untuk dicapai. Kedua, bahwa kondisi yang lebih baik itu memerlukan waktu untuk mencapainya.

Sebagai kata benda, pembangunan berkaitan dengan output, dengan hasil dari suatu kegiatan. Pertanyaan yang relevan disini ialah berapa banyak output yang diinginkan. Ini menyangkut input yang dibutuhkan, jenis dan pola produksi yang sesuai dan sebagainya.

Sebagai kata kerja, pembangunan diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus menerus. Dengan kata

lain, pembangunan bersifat dinamis. Konsekuensinya seperti disebutkan Katz, bahwa "any analytic frame work for development action overtime" (Katz, 1971 : 9). Kondisi dinamis dari perubahan ini bisa dilihat dalam dua konteks. Pertama, masyarakat itu selalu berubah. Tak ada yang tak berubah selain Tuhan, kecuali perubahan itu sendiri. Sebab itu suatu kegiatan yang dilakukan tepat untuk suatu waktu belum tentu tepat untuk waktu yang lain. Ini membawa akibat pada perlunya data-data baru pada setiap perencanaan pembangunan. Kedua, bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk membawa perubahan, yakni perubahan dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana.

Menurut Siagian (1996 : 3) bahwa "pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh komunitas, bangsa, negara, dan pemerintah menuju kemajuan atau modernitas".

Selanjutnya menurut Todaro (Kunarjo, 1996 : 6) "pembangunan merupakan proses multi dimensi yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi dan seluruh system sosial dan ekonomi".

Lebih lanjut menurut Todaro (1988) pembangunan diartikan "sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental masyarakat, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan".

Oleh karena itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses yang multi dimensional yang mencakupo berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial,

sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. Menurut Saul M. Katz (moeljanto, 1971 ; 3) "pembangunan diartikan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan nasional yang lain , yang dipandang lebih bernilai. Apa yang dipandang "lebih" bernilai bersifat spesifik dari waktu ke waktu, dari budaya satu kebudayaan lain atau dari negara satu ke negara lain

Oleh Sondang P. Siagian (1975 : 129) pengertian pembangunan dikemukakan bahwa :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan .
- b. Pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan.
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan modernitas.
- c. Pembangunan mengarah pada modernitas, modernitas diartikan sebagai cara hidup dan lebih baik daripada sebelumnya serta mampu menguasai sekitarnya.

Sedangkan menurut Tjadi Aman (1986 : 1) bahwa "pembangunan adalah proses yang terus menerus dilakukan secara berencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Selanjutnya dikemukakan pengertian perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996 :12) "perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien".

Menurut Hdjisarroso (Muhammad Yahya, 1985 : 9) menyebutkan bahwa “pembangunan daerah dalam hubungan fungsi daerah pengembangan wilayah nasional fungsi daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan dan kebutuhan nasional adalah dalam hal komoditi barang dan jasa pendapatan dan lapangan daerah”.

Menurut Suarsono (Muhammad Yahya, 1985 :9), menyatakan bahwa “pembangunan daerah adalah merupakan salah satu pendekatan pembangunan nasional yang sudah mewarnai pembangunan daerah sejak pelita II. Program pembangunan daerah ini semakin meningkat dalam pelita III dengan hampir 18 % dari seluruh dana pembangunan diarahkan untuk keperluan pembangunan daerah, belum termasuk dana rutin uang untuk perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sering mempunyai hakekat pembangunan”.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Batasan Wilayah

Kelurahan SepeE adalah salah satu bagian dari Wilayah Kabupaten Barru yang terletak di Kecamatan Barru yang mempunyai batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tuwung
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siawung
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tompo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mangempang

Jumlah Lingkungan di Kelurahan Sepe'E terdiri dari 4 Lingkungan :

1. Lingkungan Kajuara berada disebelah selatan pinggir Kota dengan bebatasan Kelurahan Mangempang.
2. Lingkungan Batubessi berada di tengah-tengah Kelurahan SepceE yang diapit 3 lingkungan serta dilalui jalur transportasi Propinsi.
3. Lingkungan SepeE berada sebelah utara Pegunungan yang dilalui jalur transportasi
4. Lingkungan JeppeE berada di sebelah barat dengan lokasi wilayah pegunungan.

Jarak dari pemerintah kelurahan sebagai berikut :

1. Jarak dari Ibukota Kabupaten Barru 5 km.
2. Jarak dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan 1004 km

B. Kondisi Geografis

1. Ketinggian tanah dari permukaan air laut : 90 m.
2. Banyaknya curah hujan.
3. Topografi : sedang

C. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk adalah menggambarkan keadaan kondisi penduduk yang tinggal atau yang bertempat tinggal didaerah, wilayah tertentu berdasarkan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, sumber daya alam.

1. Keadaan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk

Berdasarkan pendataan sensus penduduk, jumlah penduduk Kelurahan Sepe'E adalah 2853 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.283 jiwa dan perempuan 1.570 jiwa. Sedangkan dilihat dari kelompok usia dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kelurahan Sepe'E,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	0 – 4	245	8,58 %
2.	5 – 9	277	9,70 %
3.	10 – 14	277	9,70 %
4.	15 – 19	246	8,62 %
5.	20 – 24	262	9,18 %
6.	25 – 29	176	6,16 %
7.	30 – 34	151	5,29 %
8.	35 – 39	195	6,83 %
9.	40 – 44	250	8,76 %
10.	45 – 49	312	10,93 %
11.	50 – 54	209	7,32 %
12.	55 -	253	8,86 %
	Jumlah	2853	100 %

Sumber : Data Sekunder 2004

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa kelompok kerja yang terbanyak dengan dihitung dari usia 10 tahun ke atas, maka dengan banyaknya usia yang produktif dalam kegiatan ekonomi petani yang mana hal tersebut merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kelurahan Sepe'E.

2. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Masyarakat Barru adalah masyarakat yang sangat menghargai orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu menyekolahkan anak bagi orang tua adalah cita-cita yang utama, meskipun sang anak hanya tamat sekolah di SD, SLTP, SLTA, dan tentunya yang paling diharapkan adalah menjadi Sarjana. Masyarakat Kelurahan Sepe'E khususnya sangat mengharapkan anak mereka bersekolah ditingkat yang lebih tinggi, bagi masyarakat yang kurang mampu hanya mengharapkan bantuan pendidikan dari pemerintah maupun lembaga sosial yang peduli terhadap pendidikan anak.

Keadaan pendidikan di Kelurahan Sepe'E secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Sepe'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Belum Sekolah	245	2,39 %
2.	Tidak pernah sekolah	876	52,45 %
3.	Pernah SD tapi tidak tamat	327	19,58 %
4.	Tamat SD	370	8,44 %
5.	Tamat SLTP	267	7,78 %
6.	Tamat SLTA	333	7,72 %
7.	D-2	55	0,65 %
8.	D-3	112	0,53 %
9.	S-1	224	0,41 %
10	S-2	44	
	Jumlah	2853	100 %

Sumber : Data Sekunder 2004

Berdasarkan tabel 2 dapat dikemukakan bahwa masyarakat kelurahan Sepe'E sebagian besar tidak pernah merasakan bangku pendidikan, dimana terlihat jelas dalam tabel yaitu sebanyak 52,45 %, dan dapat dilihat juga dengan jelas bahwa jumlah sarjana yang ada di kelurahan Sepe'E hanyalah sebagian kecil dari masyarakat yaitu 0,41 %. Dengan melihat perbedaan yang cukup signifikan yang terdapat dalam tabel diatas, maka tidaklah berlebihan jika masyarakat mengharapkan bantuan beasiswa kepada anak mereka demi melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

3. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tingkat kehidupan penduduk suatu daerah ditentukan oleh sumber mata pencaharian yang digeluti penduduk. Salah satu unsur kebudayaan yang amat penting bagi manusia adalah jenis mata pencaharian, yakni dengan apa manusia itu hidup mempertahankan dan mengembangkan hidupnya.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat memberikan gambaran mengenai peranan berbagai usaha ekonomi penduduk. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui kegiatan apa yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian di Kelurahan Sepe'E dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Sepe'E,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Pegawai	123	40,46 %
2.	Pedagang	22	7,23 %
3.	Penjahit	9	2,96 %
4.	Tukang batu	36	11,84 %
5.	Tukang kayu	13	4,27 %
6.	Peternak	50	16,47 %
7.	Montir	4	1,31 %
8.	Sopir	34	11,18 %
9.	Peng.Becak	10	3,28 %
10.	TNI / POLRI	3	0,98 %
	Jumlah	304	100 %

Sumber : Data Sekunder 2004

Berdasarkan 3, dapat diketahui bahwa mata pencaharian pokok penduduk Kelurahan Sepe'E mayoritas pegawai dengan persentase 40,46 %. Meskipun terlihat jelas dalam tabel jenis usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi yang paling nyata terlihat dan terdapat dalam masyarakat kelurahan Sepe'E dan tidak terlihat dalam tabel yakni usaha pertanian. Hampir sebagian besar penduduk kelurahan Sepe'E menggantungkan hidupnya pada pertanian, termasuk juga penduduk yang

tercatat dalam tabel memiliki usaha lain, berdasarkan kenyataan tetap memiliki lahan pertanian yang akan diolah sebagai usaha penunjang.

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang proses kegiatan sosial dan ekonomi, maka sarana dan prasarana sangat penting keberadaannya. Hal tersebut selain menunjang kegiatan sosial ekonomi tertentu, juga mempengaruhi proses mobilisasi sosial individu atau masyarakat.

Beberapa sarana penting yang menunjang proses kegiatan sosial ekonomi di Kelurahan Sepe'E antara lain sebagai berikut :

1.Sarana Pendidikan

Tabel 4
Distribusi Jumlah dan Jenis Sarana Pendidikan di Kelurahan Sepe'E,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1.	TK	2	28,57 %
2.	SD	5	71,42 %
	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Sekunder 2004

Berdasarkan tabel 4, sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Sepe'E hanya berjumlah 7 unit lembaga pendidikan formal, 2 unit taman kanak-kanak dan 5 unit sekolah dasar.

2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Sepe'E yaitu 3 unit posyandu, dan 1 unit puskesmas pembantu yang membantu dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Sarana Ibadah

Aspek lain dari kehidupan masyarakat Kelurahan Sepe'E yang cukup penting diperhatikan adalah aspek keagamaan. Kelurahan Sepe'E memiliki 4 buah mesjid yang letaknya berada di tiap lingkungan, karena mayoritas masyarakat kelurahan Sepe'E beragama Islam.

4. Sarana Transportasi

Salah satu aspek yang juga paling menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Sepe'E yaitu transportasi. Prasarana transportasi yang ada di Kelurahan Sepe'E terdiri dari jalan kampung yang telah diaspal maupun yang masih merupakan jalan tanah, gang yang terdapat di kelurahan Sepe'E juga memiliki jalan yang telah diaspal, dan sebagiannya masih jalan tanah, di kelurahan Sepe'E juga terdapat jembatan beton yang merupakan penghubung di kelurahan. Adapun sarana transportasi yang sering melalui jalan kelurahan yaitu, bus umum, angkot, ojek, bendi dan becak.

5. Sarana Air Bersih

Air merupakan salah satu unsur kehidupan yang sangat diperlukan manusia untuk bertahan hidup, kebutuhan akan air bersih pun sangat diperhatikan oleh

masyarakat kelurahan Sepe'E. Penggunaan ataupun pemanfaatan sumber air bersih dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5
Distribusi Jumlah Sarana Air Bersih di Kelurahan Sepe'E,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1.	Sumur gali	97	24,93 %
2.	Air sungai	9	2,31 %
3.	Perpipaan	134	34,44 %
4.	PAM	149	38,30 %
	Jumlah	389	100 %

Sumber : Data Sekunder 2004

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan Sepe'E selain memanfaatkan PAM yang 149 rumah tangga yang menggunakannya, juga sebagian besar mengandalkan sumber mata air dilingkungannya dengan menggunakan perpipaan, itu terlihat jelas dengan 134 rumah tangga yang menggunakannya.

E. Gambaran umum BKM Siapakainge Kelurahan Sepee

Pada bagian ini akan disampaikan gambaran singkat tentang keadaan BKM Siapakainge sebagai salah satu lembaga yang dibentuk melalui proses demokrasi dengan melibatkan semua masyarakat kelurahan Sepee.

- Nama BKM : SIPAKAINGE
- Nama Koordinator BKM : Ahmar Arifai
- Alamat Sekretariat : Jalan Pahlawan No. Kajuara
- Telpon : 0427 – 2323071
- Fax. : 0427 – 21283
- a. Kelurahan : SepeE
- b. Kecamatan : Barru
- c. Kabupaten : Barru
- d. Propinsi : Sulawesi Selatan
- Jumlah Anggota BKM : 13 Orang
- Jumlah Anggota BKM Laki-Laki : 10 Orang
- Jumlah Anggota BKM Perempuan : 3 Orang
- Akta Notaris Nomor : 13 - Tgl 09 Juli 2005
- Nama Notaris : TATI SELASTIWATI, SH
- Hari & Tanggal Pembentukan : Selasa, 29 Maret 2005

Dalam melaksanakan kegiatan, BKM Sipakainge dibantu oleh Unit-Unit Pengelola dengan merekrut secara profesional dengan mengadakan seleksi yang ketat. Dari hasil seleksi seleksi Unit tersebut, maka ditetapkan Unit Pengelola serta Pembukuan dan perangkat lainnya sbb :

1. Unit Pengelola Keuangan
2. Unit Pengelola Sosial
3. Unit Pengelola Lingkungan
4. Sekretariat

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik Responden

Berbicara tentang karakteristik responden maka kita tidak akan lepas pada keseharian orang yang akan kita jadikan responden maupun informan, baik itu pada persoalan kesehariannya, tentang cara hidup yang menjadi ciri khas dari mereka dalam keseharian, sebagai manusia maka dalam setiap diri itu terdapat karakteristik yang menjadi pembeda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Selain pada persoalan cara hidup dan perilaku maka karakteristik itu pun bisa dilihat dari beberapa aspek pula .

Sesuai dengan penelitian ini yang berjudul Peranan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Sepee maka responden dan informan dijadikan menjadi satu bagian utuh dan saling terkait dan tidak berusaha menutupi dengan melakukan pembagian secara utuh sehingga mewakili setiap unsur yang menjadi responden maupun informan sebab metode yang digunakan adalah metode wawancara mendalam dan mengamati secara langsung dilapangan tentang realitas yang terjadi didaerah penelitian guna mendukung hasil dari penelitian ini, informan dalam penelitian ini adalah semua digunakan dalam pemilihan informan baik dari anggota BKM Sipakainge itu sendiri, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Untuk penguraian lebih jelas maka akan tergambar

pada bagian lain pembahasan ini, mengapa kemudian informan yang penulis ambil dari seluruh komponen yang ada di atas dikarenakan menurut penulis bahwa informan yang dipilih sudah merupakan mewakili atas segala bentuk pertanyaan yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya peneliti merahasiakan identitas responden dengan memakai singkatan nama dari responden untuk kepentingan penelitian

Penjelasan mengenai identitas responden atau informan akan diuraikan sebagai berikut ini :

1. Informan dari anggota BKM Sipakainge sebanyak 12 orang. Sebenarnya semua jumlah anggota BKM sipakainge menjadi sasaran peneliti untuk diwawancarai namun hanya dua belas anggota BKM Sipakainge yang berhasil diwawancarai oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian dilokasi. Satu orang anggota BKM Sipakainge ini tidak ingin diwawancarai karena beralasan sudah lama tidak aktif lagi di BKM karena tidak berdomisili lagi di kelurahan Sepee dan BKM Sipakainge belum mengadakan pergantian sampai pada saat penelitian berakhir dilaksanakan. Selain anggota BKM juga unit pengelola menjadi sasaran peneliti untuk dijadikan responden yaitu satu orang dari tiap unit pengelola (unit pengelola lingkungan (UPK), unit pengelola sosial (UPS), unit pengelola keuangan (UPK) dan satu orang Sekretariat. Anggota BKM Sipakainge yaitu : Mhm, Ahmr, Skr, Fsl, SA, Ans, Hrn, Whd, AsS, Sbh, LA, dan Sk

UPK yaitu Her

UPS yaitu Shr

UPS yaitu Nhd

Dan Sekretariat yaitu Rsl.

2. Informan dari masyarakat sebanyak 20 orang. 20 orang informan tersebut dibagi dalam 4 lingkungan masing-masing 5 informan dari tiap lingkungan. Dari lingkungan Jepee diwakili oleh Ksm, Smb, Ru, Skl, NgW,.Lingkungan Kajuara diwakili oleh Swd, Juh, Cl, Mur, dan Mstp. Dari lingkungan sepee diwakili oleh Prd, jum, Ahmd, Skm,dan Hsd. Dan dari lingkungan Batu Bessi diwakili oleh Syr, Sub, AmM, Khr dan Whd. Tiap 5 informan terdapat dua orang tokoh masyarakat ,kepala lingkungan, masyarakat biasa, ketua KSM. Dengan perincian 14 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.
3. Informan dari aparat pemerintah kelurahan terdiri dua orang informan yaitu kepala kelurahan "HrA"dan sekertaris lurah "Syp".

Kegiatan wawancara peneliti lakukan pada saat rapat interen BKM Sipakainge dan dengan mengunjungi secara langsung rumah masyarakat kelurahan Sepee yang menjadi informan penelitian.

B. Peranan BKM Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Gambaran tentang peranan Badan Keswadayaan Masyarakat Sipakainge terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dikemukakan berikut ini, merupakan hasil observasi lapangan peneliti, dan wawancara terhadap sejumlah anggota BKM Sipakainge, masyarakat, dan aparat pemerintah kelurahan Sepee.

Suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan dapat menjalankan fungsinya apabila lembaga tersebut dapat diterima dan diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Seperti halnya BKM Sipakainge meski keberadaannya terbilang baru di kelurahan Sepee namun sudah diketahui oleh hampir semua lapisan masyarakat kelurahan Sepee.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara "Ahmr"

"Pembentukan BKM di kelurahan Sepe'E dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat dari tingkat RT sampai dengan tingkat kelurahan, maka BKM murni lahir berdasarkan pemilihan masyarakat.

(Wawancara 25 April 2007)

Informan "Skr" juga mengatakan bahwa

"BKM'Sipakainge' yang ada di kelurahan Sepe'E merupakan lahir dari kesepakatan dan keinginan bersama masyarakat, karena masyarakat sendiri yakin dengan pilihan dan kemampuan mereka tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun". *(Wawancara 25 April 2007)*

Hasil wawancara dengan "Whd" juga mengutarakan

"Masyarakat kelurahan Sepee umumnya telah mengetahui keberadaan BKM Sipakainge, selain karena sebelumnya pemerintah dan masyarakat telah melakukan sosialisasi sejak awal jauh sebelum BKM akan dibentuk. masyarakat banyak yang berpartisipasi pada saat pembentukan ditambah lagi dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui pemamfaatan dana proyek P2KP yang menyentuh kepada masyarakat".(Wawancara tanggal 22 April 2007)

"Sk" mengemukakan

"Sudah selayaknya masrakat lebih tahu akan keberadaan BKM Sipakainge sebab sosialisasi telah berulang kali kami lakukan bersama dengan pemerintah".(Wawancara tanggal 22 Aril 2007)

Beberapa anggota masyarakat kelurahan Sepee yang dimintai keterangan oleh penulis tentang kehadiran BKM Sipakainge juga umumnya menjawab bahwa telah mngetahui kehadiran lembaga yang tergolong baru bagi masyarakat kelurahan Sepee.

Hai ini senada dengan hasil wawancara dengan "Ksm"

Sebelumnya kami telah mengetahui akan ada pembentukan BKM jadi kami pun turut serta pada saat pemilihan anggota BKM berdasarkan informasi yang kami terima dari kepala lingkungan maupun dari masyarakat itu sendiri. (Wawancara tanggal 27 April 2007)

“Smb” juga menambahkan

“Saya sudah tahu akan kehadiran BKM karena jauh sebelum pembentukan sudah ada pemberitahuan. Ditambah lagi adanya rapat persiapan pembentukan BKM “. *(Wawancara tanggal 27 April 2007)*.

Hasil wawancara dengan “Prd”

Meski tidak diwajibkan seperti pada pemilu umumnya tapi saya ikut saat pembentukan BKM dengan harapan agar kelak dana proyek yang akan dilaksanakan oleh BKM dapat bermamfaat dan berguna bagi masyarakat. “. *(Wawancara tanggal 28 April 2007)*.

Hasil wawancara dengan “Juh” “BKM adalah lembaga masyarakat yang bertugas menjalankan dana bantuan pemerintah yaitu P2KP dan dana bantuan lainnya”. “. *(Wawancara tanggal 28 April 2007)*.

Hasil wawancara dengan “Swd”

“BKM merupakan wadah bagi kami dalam merencanakan program pembangunan khususnya yang berkaitan dengan pemamfaatan dana bantuan langsung masyarakat khususnya P2KP dan diharapkan agar BKM mampu menjadi wadah bagi kami dalam mengaspirasikan suara kami bukan cuma dalam batas pemamfaatan dana P2Kp tapi setidaknya mampu diangkat pada program pemerintah”. “. *(Wawancara tanggal 28 April 2007)*.

“Sub” megemukakan

“Masyarakat cuma paham kehadiran BKM sebagai pelaksana P2KP karena memang kegiatan awalnya hanya merupakan pelaksana proyek P2KP sehingga yang terbayang pada pikiran masyarakat adalah BKM merupakan pelaksana proyek P2KP. Padahal kedepannya diharapkan bahwa BKM lebih berfungsi sebagai wadah dalam mengaspirasikan kebutuhan masyarakat yang dapat dibawa kepada program pembangunan pemerintah”. “. *(Wawancara tanggal 28 April 2007)*.

“AmM” mngutarakan

“Meski pemahaman masyarakat tentang peranan kehadiran BKM itu sendiri umumnya merupakan pelaksana P2KP tapi paling tidak tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi dan memperlihatkan kemajuan yang pesat”. “(Wawancara tanggal 28 April 2007).

Sedikit berbeda dengan pernyataan “Khr”

” Sebelumnya saya tidak terlalu tahu akan kehadiran BKM Sipakainge karena saya sendiri tidak ikut pada pemilihan BKM Sipakainge karena pada waktu itu saya belum berada di kelurahan ini (merantau). Namun saya akhirnya mengetahuinya dari informasi tetangga ditambah lagi kegiatannya yang nampak didepan mata.”(Wawancara tanggal 29 April 2007)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang berasal dari anggota BKM Sipakainge, masyarakat serta aparat pemerintah kelurahan diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat kelurahan Sepee telah mengetahui akan keberadaan BKM Sipakainge di kelurahan Sepee. Hal ini dikarenakan sebelum pembentukan BKM baik masyarakat maupun pemerintah telah mengadakan sosialisasi tentang BKM dan tugas serta fungsi BKM itu sendiri. Disamping itu proses pembentukan BKM itu sendiri melalui proses rembuk warga untuk menilai dan memutuskan apakah perlu pembentukan BKM atau memfungsikan lembaga yang sudah ada sebagai BKM yang nantinya akan menangani dana bantuan langsung masyarakat. Ditambah lagi proses pemilihan anggota BKM diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat RT di masing – masing lingkungan yang ada di kelurahan Sepee sampai pada

pemilihan di tingkat kelurahan dengan utusan masing-masing dari anggota BKM yang terpilih di tingkat RT. Peserta pemilihan pun melibatkan segenap lapisan masyarakat. Meski arti kehadiran BKM lebih dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai lembaga pengelola dana bantuan langsung masyarakat yaitu khususnya dana P2KP namun secara tidak langsung dipahami sebagai wadah partisipasi pembangunan melalui kegiatan yang diadakannya yang berorientasi pada partisipasi aktif masyarakat.

Ketika ditanya mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan BKM Sipakainge ini, BKM Sipakainge menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah terlihat sejak awal kehadiran PKM dimana masyarakat terlibat langsung dalam pembentukan BKM Sipakainge ini. Proses pembentukan BKM dimulai dari basis terkecil dengan melibatkan masyarakat dari semua unsur untuk memilih utusan BKM tingkat RT. Setelah terpilih utusan tingkat RT, maka diadakan pemilihan tingkat kelurahan dilaksanakan melalui musyawarah atau rembug masyarakat dengan tujuan memilih pimpinan kolektif BKM sebanyak 13 orang. Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa 35 % penduduk di kelurahan Sepee mengikuti musyawarah pembentukan BKM melampaui ketentuan sebenarnya untuk syarat jumlah qourum yaitu dari 30% dari jumlah penduduk dewasa kelurahan Sepee

Berdasarkan data sekunder yang peneliti peroleh berikut ini akan disajikan tentang data peserta dan persentase jumlah masyarakat yang ikut dalam proses

pemilihan anggota BKM Sipakainge pada tanggal 18 sampai dengan 21 Maret 2007 secara bergiliran tiap lingkungan.

Tabel . 6.

Persentase jumlah masyarakat kelurahan Sepee yang terlibat pada pemilihan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat Tingkat RT

Lokasi Lingkungan	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Terlibat Pada Pemilihan BKM		Utusan Terpilih	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
RT 1 Kajuara	88	117	45	53	3	11
RT 2 Kajuara	91	97	27	35	10	4
RT 1 BatuBessi	86	103	22	41	6	4
RT 2 BatuBessi	86	95	44	47	12	2
RT 3 BatuBessi	83	91	33	43	8	6
RT 1 Jeppee	78	89	27	40	7	7
RT 2 Jeppee	92	105	26	35	7	5
RT 3 Jeppee	77	99	23	30	6	2
RT 1 Sepee	80	93	30	47	10	3
RT 2 Sepee	97	89	25	38	4	5
RT 3 Sepee	94	98	21	38	3	6
Jumlah	952	1076	323	447	76	55

Sumber Data : Data Sekunder 2007

Berdasarkan data pada tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat kelurahan Sepee yang terlibat dalam pemilihan anggota BKM Sipakainge sebanyak 323 orang laki-laki dan 447 orang perempuan atau sebanyak 770 penduduk dewasa kelurahan Sepee. Hal ini berarti bahwa 38 % penduduk dewasa kelurahan Sepee telah

mengikuti pemilihan anggota BKM melampaui persyaratan batas 30% penduduk dewasa yang harus hadir saat pemilihan anggota BKM.

BKM "Sipakainge" merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan pilihan masyarakat sendiri, pada pemilihan anggota BKM masyarakat bebas memilih orang yang dianggap layak dan yang dianggap siap menjadi relawan untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ada disekitar kelurahan Sepe'E. Kehadiran BKM 'Sipakainge' di kelurahan Sepe'E seperti membawa angin segar yang menyejukan masyarakat disekelilingnya, hal itu disebabkan oleh munculnya BKM sebagai lembaga baru yang mewadahi masyarakat yang ada di Kelurahan Sepe'E.

BKM 'Sipakainge' adalah lembaga otonom dan independent yang dibentuk oleh utusan masyarakat di Kelurahan Sepe'E dengan tujuan utama melakukan pemberdayaan masyarakat, mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat khususnya masalah kemiskinan, serta menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antara warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama.

Pemilihan BKM ditingkat kelurahan dilaksanakan dengan melalui musyawarah atau rembuk masyarakat dengan tujuan memilih pimpinan kolektif BKM serta menetapkan AD, Koordinator serta nama BKM. Proses pemilihan BKM dihadiri oleh aparat pemerintah, yaitu tokoh masyarakat, kepala lingkungan, kepala kelurahan,serta aparat pemerintahan yang lain.

"Rsl" mengemukakan bahwa

"Orang-orang yang menjadi anggota BKM tidak dipilih begitu saja, namun merupakan wakil masyarakat yang terpilih melalui rembuk

desa/kelurahan yang telah dilakukan. Pada pemilihan BKM masyarakat diajak rembug bersama untuk menentukan kepanitiaan dengan tetap melibatkan masyarakat secara langsung". (*Wawancara tanggal 23 April 2007*)

Sebagai lembaga yang terbilang yang ada di kelurahan Sepee, BKM Sipakainge diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai rangkaian kegiatan pemamfaatan proyek pembangunan yang dimana pada pelaksanaannya harus sejalan dengan konsep partisipasi pembangunan oleh masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. BKM Sipakainge sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan bantuan kelurahan senantiasa diharapkan bagaimana setiap pelaksanaan programnya dalam rangka pemamfaatan dana proyek bantuan khususnya bantuan proyek P2KP senantiasa melibatkan masyarakat. Dari berbagai rangkaian kegiatan BKM Sipakainge yaitu perencanaan melalui kegiatan Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM), pelaksanaan dengan penyaluran dana dan pemamfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembangunan prasarana lingkungan, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi, dan evaluasi serta monitoring hasil kegiatan melalui Rembug Warga Tahunan (RWT) akan nampak bagaimana masyarakat turut serta didalamnya sebagai implementasi dari partisipasi masyarakat itu sendiri.

Mengenai tentang kegiatan BKM itu sendiri senantiasa melibatkan masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan memamfaatkan dana

BLM P2KP oleh BKM Sipakainge lebih menitikberatkan pada aspek peran dan swadaya masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya menyangkut masalah alasan mereka untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan BKM adalah karena mereka menganggap bahwa dana yang dikelola oleh BKM Sipakainge lebih transparan dan sangat langsung dirasakan manfaatnya meskipun jumlahnya masih sangat minim dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan karena dana bantuan yang diturunkan akan dipakai untuk membiayai proyek yang memang merupakan usulan masyarakat dan mereka langsung melihat dan merasakannya.

"Ru" mengemukakan bahwa "Kegiatan dilaksanakan dengan lebih terperinci dan transparan serta partisipatif karena berdasarkan pada kebutuhan kami".(Wawancara tanggal 27 April 2007).

Hal senada juga diungkapkan "Hsd"

"Kami masyarakat kecil merasa sangat senang karena melalui BKM kita juga dapat merencanakan kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung kami rasakan dan sudah kami mamfaatkan seperti jembatan tani dan dana ekonomi bergulir".(Wawancara tanggal 27 April 2007).

"Ass" lebih rinci lagi menjelaskan bahwa

BKM Sipakainge adalah lembaga milik masyarakat maka sudah sepantasnya jika segala kegiatan yang dilakukan masyarakat senantiasa dilibatkan apalagi kegiatan menyangkut pemamfaatan dana bantuan yang pemamfatannya terkadang rawan penyimpanan. Makanya masyarakat lebih senang karena secara langsung dilibatkan dari sejak awal kegiatan BKM karena dapat mengetahui semua kegiatan tersebut termasuk laporan pemamfaatan dana bantuan langsung masyarakat.(Wawancara tanggal 28 April 2007).

Hasil wawancara dengan "Syr"

Salah satu faktor yang membuat masyarakat lebih termotivasi untuk mengikuti setiap kegiatan BKM Sipakainge adalah karena dana bantuan yang akan turun jelas ada didepan mata dan sudah terjadwal kapan akan diturunkan serta pemamfaatannya jelas untuk apa. (Wawancara tanggal 28 April 2007).

"CI" juga mngemukakan

Idi tau biasae maccowe maniki bawang, yang penting mannessa makkeda engka pangurusuna. Kita orang kecil cuma ikut saja yang penting sudah ada yang jelas lembaga yang mengurus dana bantuan. (Wawancara tanggal 26 April 2007)

Tentang partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan BKM Sipakainge "HrA" mengemukakan

"Antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembangunan melalui lembaga seperti BKM Sipakainge sangat kami hargai dengan perasaan syukur. Hal ini memperlihatkan kemajuan dimana masyarakat semakin sadar akan pentingnya sumbangsih mereka terhadap kegiatan pembangunan. Selaku pemerintah sangat mengharapkan bahwa hal semacam ini tidak saja didasari karena adanya dana bantuan tapi lebih diharapkan agar masyarakat sudah merencanakan kegiatan pembangunan yang bersinergi dengan program pembangunan pemerintah umumnya". (Wawancara tanggal 27 Juli 2007).

Sebagai wujud partisipasi masyarakat diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan BKM Sipakainge yaitu :

1. Perencanaan melalui Perumusan Program Jangka Menengah (PJM) dan Lokakarya

Pada pelaksanaan kegiatan ini masyarakat dihadirkan untuk memberikan masukan serta usulan mengenai rencana kegiatan

pembangunan dengan memanfaatkan dana BLM P2KP. Melalui kegiatan ini BKM Sipakainge sangat berperan dalam mentransformasi dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat agar apa yang diinginkan masyarakat bisa bersinergi dengan program pemerintah. Sehingga apa yang diputuskan betul-betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan masyarakat sendiri yang akan menikmati hasil pembangunan. Sehubungan dengan itu "SA" menyatakan bahwa

"Apa yang telah diputuskan untuk diprogramkan merupakan keinginan masyarakat sebab proses penetapan program sendiri itu melalui mekanisme rapat penetapan usulan program yang melibatkan seluruh masyarakat dari tingkat RT sampai dengan kelurahan atau paling tidak beberapa perwakilan masyarakat dari tiap lingkungan atau tokoh masyarakat yang dianggap dapat mewakili suara dari masyarakat di lingkungannya yang kemudian kami lokakaryakan dengan meminta tanggapan balik dari masyarakat tentang program yang akan dijalankan".
(Wawancara tanggal 25 April 2007)

"SkI" menambahkan

"Proses perencanaan seperti ini (maksudnya penyusunan PJM) sudah semestinya dilakukan agar pemanfaatan dana P2KP lebih tepat sasaran karena memang dibutuhkan masyarakat." (Wawancara 1 Mei 2007).

Hal senada juga diungkapkan oleh "Ans" bahwa

"Proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil kesepakatan. Semua yang hadir dalam rapat / pertemuan diberi keleluasaan untuk menyampaikan usul atau pendapat mereka yang kemudian akan dibahas dan akhirnya menjadi suatu keputusan akhir yang akan diprogramkan". (Wawancara tanggal 27 April 2007)

"Hrn" mengemukakan

"Segala sesuatu yang diputuskan dalam setiap rapat atau pertemuan merupakan pencerminan dari keinginan masyarakat sebab disinilah peran dari masyarakat apa yang mereka inginkan akan dibahas bersama dalam setiap rapat atau rembuk warga kemudian diputuskan bersama. Sebagai wadah masyarakat partisipasi masyarakat cukup tinggi hal ini dapat dilihat pada setiap rapat diikuti oleh masyarakat atau paling tidak beberapa perwakilan masyarakat agar segala keputusan yang dikeluarkan betul-betul mencerminkan keinginan dari masyarakat. Hal ini dapat juga dilihat pada saat pelaksanaan kegiatan maupun saat evaluasi masyarakat tidak ada yang mengkompalain." (*Wawancara tanggal 27 April 2007*)

b. Pelaksanaan / Aplikasi program

Upaya pelaksanaan kegiatan BKM yang mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya telah terealisasi serta dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang ada di kelurahan Sepe'E dan pada tingkat pelaksanaan partisipasi masyarakat cukup tinggi salah seorang anggota BKM Sipakainge menyatakan pada dasarnya pelaksanaan kegiatan oleh BKM tetap mengacu pada keputusan bersama saat rapat perencanaan program kerja.apakah itu program yang bersifat fisik maupun non fisik. Semua terlaksana dengan baik berkat dukungan dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi baik secara materil maupun secara fisik. juga tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan cukup tinggi khususnya pembangunan fisik. Hal ini dapat kita lihat pada anggaran pembangunan fisik seperti

jembatan tani sebagian merupakan dana proyek sebagian lagi merupakan hasil daripada swadaya masyarakat.

Adapun realisasi daripada program kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini adalah meliputi kegiatan Tri Daya yaitu :

BKM dalam upaya melaksanakan kegiatan yang dirumuskan dalam PJM bersama dengan masyarakat telah melaksanakan kegiatan yang saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan pada sekretariat BKM Sipakainge, adapun kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP sebesar Rp. 150.000.000.' dan dicairkan secara bertahap dengan tiga tahap pencairan dana bantuan yaitu berupa Kegiatan TRIDAYA yaitu Pembangunan Fisik, Pemberdayaan KSM dan Santunan Sosial dalam kurun waktu September 2005 sampai dengan Februari 2007:

- a. Tahap pertama dicairkan sebesar Rp. 30.000.000 atau 20 % dari jumlah dana P2KP yang diterima.
- b. Tahap kedua sebanyak Rp. 70.000.000 atau 50%.
- c. Tahap ke tiga sebesar Rp. 45.000.000 atau 30 %

Pemamfaatannya meliputi kegiatan pembangunan sebagai berikut :

1). Pembangunan Fisik Lingkungan

Kegiatan fisik dikelola oleh unit pengelola lingkungan dan membentuk panitia sendiri untuk melaksanakan pembangunan fisik. Program yang telah

dilaksanakan sebagian swadaya dari masyarakat khususnya program pembangunan fisik. Menurut "Shr"

"Salah satu partisipasi masyarakat terhadap pembangunan fisik tersebut adalah tetap membudayanya sifat kegotongroyongan / swadaya sehingga bila dibandingkan dengan dana yang ada dengan volume pembangunan fisik, kemungkinan besar tidak cukup digunakan, akan tetapi dengan swadaya sebagian masyarakat khususnya berupa tenaga dan konsumsi sehingga pembangunan dapat diselesaikan dengan kualitas yang baik karena yang mengerjakan adalah warga yang berada disekitar lokasi kegiatan tersebut. (Wawancara 23 April 2007)

Berdasarkan data sekunder yang peneliti dapatkan tercantum kegiatan fisik yang telah dilaksanakan oleh BKM Sipakainge dengan memanfaatkan dana bantuan P2KP yang telah disepakati bersama oleh masyarakat melalui Perumusan Proram Jangka Menengah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel. 7
Realisasi Pemamfaatan Dana P2KP Untuk Pembangunan Fisik
Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat dalam Program Jangka
Menengah (PJM)

No.	Nama Kegiatan	Dana berdasarkan jumlah BLM	Dana Berdasarkan swadaya masyarakat
1.	Pembuatan Drainase got (RT 1 RW) 1 unit	Rp.4000.000	Rp.500.000
2.	Pembangunan Irigasi tersier (RT 2 RW 1) 1 unit	Rp.5000.000	Rp.650.000
3.	Pembuatan tempat sampah (RT 3 RW 2) 1 unit	Rp.1.500.000	Rp.250.000
4.	Pembangunan jalan setapak (RT 2,RW 2) 1 unit	Rp.5.100.000	Rp.450.000
5.	Pembangunan jembatan tani (RT 2,RW 3) 1	Rp.5000.000	Rp.500.000
6.	Pembuatan saluran talu (RT 3,RW 3) 1 unit	Rp.1.600.000	Rp.300.000
7.	Pembuatan WC umum (RT 1,RW 4) 1 unit	Rp.4.900.000	Rp.300.000
8.	Pembuatan sumur umum (RT 2,RW 4) 1 unit	Rp.1.400.000	Rp.250.000
9.	Pembuatan drainase (RT 2,RW 1) 1 unit	Rp.3.750.000	Rp.350.000
10.	Pembuatan WC umum (RT 3,RW 3) 1 unit	Rp.2.500.000	Rp.250.000
	Jumlah	Rp.34.750.000	Rp.3800.000

Sumber Data : Data Sekunder 2007

2). Pembangunan Sosial

Kegiatan sosial yang dimaksud terdiri dari 3 jenis kegiatan yaitu santunan bea siswa, santunan jompo, dan santunan rumah tidak layak huni.

Kegiatan sosial ini memanfaatkan dana P2KP.

Terkait dengan kegiatan sosial ini baik data penerima dana sosial maupun penyalurannya tidak lepas dari bantuan dan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh "Nhd"

Kegiatan sosial yang dilakukan tidak lepas dari partisipasi masyarakat, yang memberi keterangan tentang masyarakat yang rumahnya sudah tidak layak untuk dihuni, juga tentang daftar anak yang memerlukan bantuan besiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka tentunya. Data calon penerima dana santunan sosial ini kemudian diolah dalam kegiatan perencanaan yang dituangkan dalam PJM Pro-nangkis bersama BKM dan masyarakat untuk menghindari penyaluran dana yang tidak tepat sasaran.

(Wawancara tanggal 25 April 2007)

Hal ini juga dikemukakan oleh "Jum"

Pendataan kami lakukan berdasarkan kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan dana sosial sebagaimana yang telah dirumuskan bersama pada saat penyusunan PJM antara masyarakat dan BKM serta pemerintah kelurahan. *(Wawancara tanggal 26 April 2007)*

Masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pendataan baik itu relawan maupun kader organisasi kemasyarakatan dan masyarakat umum juga penilaian terhadap masyarakat yang berhak memperoleh santunan sosial.

"Nhd" menambahkan

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan diverifikasi yang mana akan lebih diprioritaskan untuk terlebih dahulu mendapatkan santunan sosial. Tentunya berdasarkan daftar KK miskin serta penilaian langsung dilapangan serta memperhatikan pertimbangan dari masyarakat. *(Wawancara tanggal 25 April 2007).*

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial ini sangat besar dirasakan manfaatnya baik oleh BKM itu sendiri maupun masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikemukakan oleh "Skr"

"Informasi yang diberikan oleh masyarakat tentang kondisi masyarakat khususnya yang layak untuk dimasukkan dalam daftar penerima santunan sosial sangat kami butuhkan karena masyarakat sendiri yang lebih mengetahui kondisi sekitarnya."(Wawancara 25 April 2007).

Senada dengan pernyataan di atas "HrA" mengemukakan

Kegiatan semacam ini sangat membantu pemerintah dalam mengetahui kondisi masyarakat dan perkembangan masyarakat dimana data demikian sangat diperlukan untuk kegiatan atau program pemerintah di bidang sosial misalnya pembagian raskin. (Wawancara 26 April 2007)

Mengenai kegiatan sosial ini pengelola juga bekerja sama dengan instansi pemerintah yang terkait yakni pihak pemerintah kelurahan Sopee sendiri, Karang Taruna serta Departemen Sosial.

Adapun pemanfaatan dana sosial oleh BKM Sipakainge berdasarkan data sekunder yang peneliti peroleh dari sekretariat BKM Sipakainge dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8
Realisasi Pemamfaatan Dana P2KP Tahap I Untuk Kegiatan Sosial

Jumlah Alokasi Dana P2KP Untuk Santunan Jompo	Jumlah Jompo Penerima Santunan P2KP	Besarnya Santunan Yang Diberikan Kepada Tiap Jompo
Rp. 25. 200.000.'	120	Rp. 210.000.'

Jumlah Alokasi Dana P2KP Untuk Beasiswa	Jumlah Siswa Penerima Beasiswa P2KP	Besarnya Bea Siswa Yang Diberikan Kepada Tiap Siswa
Rp.5. 600.000.'	56	Rp. 100.000.'

Jumlah Alokasi Dana P2KP Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Dana P2KP Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Besarnya Dana Yang Diberikan Kepada Tiap Kepala Keluarga Penyandang Rumah Tidak Layak Huni
Rp. 7. 457.500.'	19	Rp. 392.500.'

Sumber Data : BKM Sipakainge 2007

Berdasarkan tabel data sekunder yang penulis peroleh dari BKM Sipakainge dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Santunan Jompo sebesar Rp. 25.200.000 dibagi sejumlah 120 orang jompo penerima santunan yang masing-masing memperoleh Rp. 210.000.'
- b. Beasiswa sebesar Rp.5.600.000." dibagikan kepada 56 siswa dari kalangan keluarga kurang mampu yang masing-masing memperoleh Rp. 100.000.'

- c. Perbaiki Rumah Tidak layak huni sebesar Rp.7.457.500 yang dibagikan kepada 19 Kepala Keluarga masing-masing memperoleh Rp.392.500.

3). Pembangunan Ekonomi

Kegiatan ekonomi yang dimaksud yakni peminjaman dana bergulir kepada beberapa kelompok usaha ekonomi yang dalam BKM dikenal dengan nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah melalui periksa uji kelayakan. KSM merupakan kelompok ekonomi yang didalamnya terdapat beberapa anggota masyarakat yang memiliki usaha ekonomi yang akan mendapatkan bantuan ekonomi bergulir. UPK (Unit Pengelola Keuangan) BKM Sipakainge adalah pengelola yang ditunjuk untuk mengelola pinjaman yang akan diberikan kepada tiap KSM yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha kelompok masing-masing. Dana pinjaman diberikan secara berkelompok dan bukan perorangan. Hal ini berdasarkan konsep aturan P2KP. Namun sebenarnya tujuan dana diberikan secara berkelompok dan masyarakat diinginkan secara berkelompok adalah sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat untuk memecahkan persoalan secara bersama khususnya pengembangan usaha bersama, memupuk kerjasama dalam kelompok dan untuk mengembangkan konsolidasi kekuatan bersama baik yang lemah maupun yang kuat. Sedangkan proses peminjaman dana didasarkan pada keputusan masyarakat. Inisiatif pembentukan KSM haruslah dari masyarakat sendiri dan berdasarkan pada kesediaan dan kesiapan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan.

Pembentukan KSM harus mengacu pada pendapat masyarakat ketika harus memilih anggota-anggotanya, sehingga kriteria mengenai warga miskin dalam keanggotaan KSM dimaksud misalnya, merupakan keputusan masyarakat sendiri.

Sebagaimana yang diutarakan oleh "Ahmr" bahwa

"Proses jalannya ekonomi bergulir berdasarkan keputusan masyarakat sendiri baik pembentukan KSM, jangka waktu pengembalian pinjaman, besarnya bunga pinjaman maupun penetapan sanksi atas anggota KSM yang melakukan tunggakan pinjaman".(Wawancara tanggal 25 April 2007)

Kegiatan ekonomi bergulir ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil menengah . Meskipun sifatnya berupa pinjaman namun tingkat swadaya masyarakat sangat diperlukan. Dana pinjaman diberikan secara berkelompok dengan tujuan untuk agar tercipta kerjasama yang baik antara masyarakat . Maka masyarakat secara sukarela membentuk kelompok ekonomi dan telah memanfaatkan dana ekonomi bergulir.

Seperti yang dikemukakan oleh "Ngw"

Sebenarnya kemauan kami untuk membentuk kelompok dengan istilah KSM karena aturan untuk mendapatkan dana pinjaman harus berkelompok, namun lama kelamaan kami juga merasakan mamfaat dari berkelompok yang dapat mempererat kerjasama kami. (Wawancara 30 April 2007)

“Amd” juga mengemukakan

“Sebenarnya kami lebih senang jika dana pinjaman diberikan secara perorangan, namun karena harus secara berkelompok akhirnya kami sepakat untuk membentuk KSM meskipun dana pinjaman yang kami harapkan tidak sesuai dengan modal sebenarnya yang kami butuhkan namun sudah cukup membantu usaha kami”. *(Wawancara 30 April 2007)*

Informan “Hsd” juga menuturkan “tujuan utama saya bergabung dengan KSM ini, sebenarnya hanya untuk menambah modal dan sebagiannya untuk membeli makanan ternak”. *(Wawancara 30 April 2007)*

Informan “SkM” juga memberikan penjelasan mengenai kelompoknya “Kelompok kami selain ingin mendapatkan bantuan modal, juga bertujuan untuk semakin mempererat persaudaraan diantara kami jika disatukan dalam kelompok”. *(Wawancara 30 April 2007)*

Kutipan wawancara dengan “Mur”

“Kelompok kami sebenarnya sudah lama terbentuk jauh sebelum dana P2KP diturunkan yang bergerak dalam usaha penjahitan, dan kami sangat senang karena kami tidak terlalu repot untuk membentuk kelompok lagi”. *(Wawancara 30 April 2007)*

Senada dengan pernyataan informan yang lain, “Whd” menuturkan

“Kelompok kami pada awal terbentuknya bertujuan untuk memperoleh pinjaman modal dari P2KP, tapi sejak itu kami sadar pentingnya hidup dalam berkelompok”. *(Wawancara 30 April 2007)*

Adapun realisasi dari pemamfaatan dana ekonomi bergulir ini sebanyak Rp. 63.450.000.’ dan telah disalurkan kepada 22 Kelompok

Swadaya Masyarakat. Sedangkan dana yang telah digulirkan kembali sejumlah Rp. 163.700.000.' kepada sebanyak 45 KSM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat diketahui bahwa proses jalannya ekonomi bergulir secara berkelompok didasarkan pada aturan P2KP namun kelompok-kelompok yang terbentuk merupakan inisiatif dari masyarakat kelurahan Sepee. Meski tujuan utama dari kelompok yang ada di kelurahan Sepe'E adalah untuk mendapat pinjaman modal dari P2KP, namun lambat laun, anggota kelompok juga merasakan bagaimana pentingnya berinteraksi dalam kelompok, serta dapat menambah pengetahuan mereka dalam hidup kelompok.

Tujuan tiap kelompok yang ada di kelurahan Sepe'E sangat jelas yakni ingin mengembangkan usaha kelompok mereka, dan semua anggota kelompok mengetahui tentang tujuan itu karena relevan dengan tujuan para anggota kelompok yakni ingin memperoleh pinjaman dana guna memajukan usaha mereka.

c. Evaluasi

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Selain menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan juga diharapkan dapat menilai dan mengevaluasi hasil pembangunan yang ada sehingga menjadi penilaian tersendiri apakah pembangunan tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan yang direncanakan semula. Sehubungan dengan hal tersebut BKM Sipakainge dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berusaha

bagaimana untuk menerima segala masukan dari masyarakat khususnya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Pihak BKM Sipakainge menuturkan BKM menerima pengaduan dari masyarakat namun kebanyakan menyampaikannya secara lisan tetapi ada pula masyarakat menyampaikannya secara tertulis melalui surat atau blanko pengaduan yang dimasukkan pada kotak pengaduan yang telah disediakan oleh BKM Sipakainge yang terpasang pada dinding gedung dekat pintu masuk ruangan sekretariat BKM Sipakainge, namun komentar masyarakat kebanyakan berupa kepuasan atas apa yang telah dilaksanakan atau dibangun hal ini karena disamping pelaksanaan atau pengerjaannya masyarakat sendiri terlibat langsung juga segala laporan kegiatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Dalam hal ini "Fsl" mengemukakan

"Semua laporan dari masyarakat baik yang kami dengar langsung dari masyarakat maupun melalui kotak pengaduan akan kami tampung dan akan menjadi agenda tersendiri pada setiap pertemuan BKM Sipakainge apakah itu sifatnya rapat interen maupun rapat dengan masyarakat." (*Wawancara tanggal 25 April 2007*).

Sebagai sarana untuk mengevaluasi hasil daripada program yang telah dilaksanakan yaitu dengan mengumumkannya melalui papan informasi BKM Sipakainge yang ada disekretariat serta di tiap lingkungan. Dengan mengetahui program yang sebelumnya telah disusun bersama dengan kenyataan dilapangan maka masyarakat dapat mengevaluasi dan menilai hasil dari kegiatan yang telah dijalankan oleh BKM Sipakainge.

Seperti yang diutarakan oleh "Smb"

"Saya cukup dengan melihat secara langsung hasil dari kegiatan BKM yang telah kami rasakan juga dengan melihat papan pengumuman maka saya sampaikan secara langsung pada saat rapat BKM".(Wawancara tanggal 27 April 2007).

"Swd" juga mengemukakan

"Saya rasa dengan melihat secara langsung hasil dari kegiatan BKM yang telah kami rasakan sudah cukup menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi saya yang kemudian saya sampaikan secara langsung pada saat rapat BKM".(Wawancara tanggal 28 April 2007).

Senada dengan hal tersebut "AmM" mengutarakan bahwa

"Saya lebih senang menyampaikannya secara langsung pada saat pertemuan dengan BKM karena lebih leluasa untuk menyampaikan dan langsung didengar oleh yang berkepentingan. Kalaupun tidak sempat mengikutinya maka memberitahukan kepada rekan atau anggota BKM. Paling tidak bisa menjadi bahan masukan bagi BKM pada saat rapat evaluasi".(Wawancara tanggal 28 April 2007)

"Mstp" juga menuturkan bahwa

"Saya cukup menyampaikan pada orang yang selalu mengikuti rapat BKM atau menyampaikannya kepada anggota BKM yang berasal dari lingkungan saya sendiri atau anggota BKM yang saya temui sebab tidak selamanya saya dapat mengikuti pertemuan lagi pula tidak ada yang terlalu perlu dipersoalkan karena kami menilai apa yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam PJM". (Wawancara tanggal 30 April 2007).

"Fsl" menambahkan bahwa

"Selain perasaan senang masyarakat atas apa yang telah dilaksanakan terdapat pula saran dan masukan yang akan menjadi bahan untuk dibahas pada pertemuan atau rapat selanjutnya. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat kecil, kritikan dari masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang ditujukan kepada BKM sama sekali tidak ada yang ada hanya berupa dari masyarakat meminta untuk disampaikan kepada pemerintah setempat untuk dijadikan program pembangunan pemerintah kedepan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrembang)".(Wawancara 25 April 2007).

Terkait dengan program yang telah dilaksanakan oleh BKM Sipakainge,"LA" menjelaskan

"Umumnya masyarakat merasa puas dan menerima dengan senang hati sebab menurutnya apa yang telah dilaksanakan merupakan hasil daripada kesepakatan antara masyarakat dengan BKM dan pemerintah setempat pada saat penyusunan PJM. Disamping itu masyarakat sendiri sebagai pelaksana daripada kegiatan tersebut dan mereka pula yang langsung menikmati mamfaatnya." (Wawancara tanggal 25 April 2007)

BKM Sipakainge dalam hal evaluasi kegiatan semaksimal mungkin telah mengusahakan untuk membahas dan menindaklanjuti segala masukan dari masyarakat. Menurut Anggaran Dasar BKM Sipakainge bahwa evaluasi kegiatan berdasarkan pada :

1. Rapat Evaluasi BKM Sipakainge yang diadakan setiap triwulan.
2. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan pada saat Rembug Warga Tahunan.

"Rsl" menambahkan bahwa setiap rapat yang diadakan oleh BKM Sipakainge khususnya rapat evaluasi semampunya telah berusaha untuk menghadirkan masyarakat. Meski tidak semuanya masyarakat hadir tapi paling tidak perwakilan dari tiap lingkungan atau tokoh-tokoh masyarakat dan ketua KSM dianggap sudah cukup untuk memenuhi kapasitas evaluasi kegiatan.

BKM Sipakainge telah melaksanakan rapat evaluasi triwulan sebanyak 6 kali sejak dana P2KP diturunkan pada bulan September 2005. Rapat evaluasi triwulan telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut.

1. Tahun 2005 sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Desember
2. Tahun 2006 sebanyak 4 kali yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan bulan Desember.
3. Tahun 2007 sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Maret.

Sedangkan untuk Rembug Warga Tahunan dalam rangka Laporan Pertanggung jawaban telah dilaksanakan oleh BKM Sipakainge satu kali yaitu pada bulan September 2006.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa masyarakat lebih senang mengemukakan pendapatnya secara lisan melalui rapat evaluasi BKM Sipakainge, dan bahan evaluasi dan penilaian kegiatan pembangunan oleh BKM Sipakainge didasarkan pada media informasi yang secara tertulis dan dengan melihat atau merasakan secara langsung kenyataan dilapangan. Hal ini juga yang menyebabkan sehingga kritikan serta ketidakpuasan terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh BKM Sipakainge tidak ada yang ditujukan kepada BKM

Sipakainge sebab apa yang telah dilaksanakan merupakan keinginan dari masyarakat itu sendiri yang telah direncanakan secara partisipatif.

C. Hubungan BKM Sipakainge Dengan Pemerintah Kelurahan dan Lembaga Lain Yang Ada di Kelurahan Sepee Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

1) Hubungan BKM Sipakainge dengan Pemerintah Kelurahan

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan akan berhasil apabila dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Peranan pemerintah berupa dorongan atau stimulasi yang bertujuan mengarahkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dan kordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya lembaga masyarakat yang menjadi wadah partisipasi pembangunan masyarakat misalnya BKM yang ada di kelurahan Sepee. Kerjasama dan kordinasi tidak hanya sampai pada di mana kegiatan itu berakhir tapi diharapkan berkesinambungan agar kegiatan pembangunan juga berlangsung pada tatanan yang menyatu antara keinginan pemerintah dan masyarakat. BKM Sipakainge sebagai lembaga yang menjadi wadah masyarakat dalam keikutsertaannya dalam program pembangunan sedangkan pemerintah merupakan fasilitator, pengarah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara keduanya agar tercipta

kesatupaduan antara keinginan masyarakat dengan program pemerintah khususnya pemerintah kelurahan setempat.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan BKM Sipakainge senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah khususnya pemerintah kelurahan setempat. Selama ini pihak pemerintah kelurahan cukup membantu dalam pelaksanaan proyek P2KP ini. Dimana sejak awal masuknya dana P2KP dan bantuan kelurahan lainnya dan terbentuknya BKM pemerintah senantiasa memberikan dukungan baik berupa dukungan moril maupun materil yang membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Sebagaimana yang diterangkan oleh "Syp" bahwa

'Pemerintah senantiasa bersedia memberikan bantuan kepada BKM Sipakainge dalam hal penanganan permasalahan dimasyarakat sehubungan dengan tugasnya dalam pelaksanaan dan pemamfaatn dana bantuan langsung masyarakat tergantung bagaimana BKM Sipakainge dan pihak pemerintah kelurahan Sepee berkoordinasi". (Wawancara 27 April 2007).

"Mhm" mengemukakan bahwa

"Arahan, bimbingan, serta fasilitas dan informasi berupa data yang diberikan pada awal-awal berlangsungnya kegiatan BKM ini adalah wujud perhatian pemerintah yang sangat BKM dan masyarakat butuhkan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan desa/kelurahan". (Wawancara tanggal 25 April 2007)

Menurut penjelasan "Ahmr"

"Ada beberapa program yang telah bersinergi dengan program pemerintah diantaranya adalah program perbaikan prasarana lingkungan dalam rangka pencegahan genangan air yang dapat mengakibatkan berjangkitnya demam berdarah, melalui BKM masyarakat memasukkan usulan program pembuatan saluran air atau got di beberapa lokasi yang tergenang air dengan memanfaatkan dana Proyek P2KP yang ditangani oleh BKM Sipakainge". (Wawancara 25 April 2007)

"HrA" sendiri mengemukakan

Selaku pemerintah tentunya kita berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pembangunan di masyarakat antara lain menyampaikan program pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah selain itu arahan dan fasilitas telah kami berikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pemerintah yaitu proyek P2KP dan pembangunan dengan dana proyek lain yang dikelola secara kelembagaan melalui BKM. (Wawancara 26 April 2007)

Lebih lanjut lagi "HrA" menyatakan

" Dana bantuan P2KP sepenuhnya dikelola dan dipercayakan kepada BKM Sipakainge tinggal bagaimana kami dari pemerintah berupaya memberikan informasi tentang kegiatan yang berkenaan dengan program pemerintah, selain itu pemerintah senantiasa bersedia membantu dalam menangani permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang pemanfaatan dana P2KP". (Wawancara 26 April 2007)

Pemerintah dalam proses pelaksanaan program proyek bantuan kemiskinan yang dilaksanakan oleh BKM berperan sebagai media pengarah dan konsultan dalam pelaksanaan program. Hal ini dilihat dari pada saat

penyusunan program dimana pemerintah memberikan masukan berupa sosialisasi program pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah, data penduduk kelurahan dan fasilitas yang menunjang kelancaran pembangunan melalui proyek P2KP dan proyek bantuan kelurahan lainnya.. Sehingga dengan demikian tercipta kesatuan antara program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dengan program yang dijalankan oleh BKM sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam arti pembangunan tidak tumpang tindih antara pembangunan yang dibiayai dana pemerintah melalui APBD dengan program pembangunan yang dibiayai oleh proyek bantuan desa lainnya.

2) Hubungan BKM Sipakainge dengan Lembaga Lainnya di Kelurahan Sepee.

Organisasi masyarakat formal tingkat kelurahan (yakni organisasi yang dibentuk atas dasar peraturan pemerintah dan / atau perundangan lainnya) sebagai pengawas dan regulator atau pembuat kebijakan publik ditingkat lokal diharapkan mampu berperan membuat dan mengawasi kebijakan lokal yang dapat merespon serta mendukung prakarsa masyarakat dalam pembangunan melalui BKM. Oleh sebab itu dibutuhkan hubungan kordinasi antara lembaga yang ada di kelurahan agar senantiasa terjalin kerjasama dan kesatuan.

Seperti halnya dikelurahan Sepee, terdapat tiga lembaga yaitu Lembaga Ketahanan Kelurahan, Karang Taruna, serta Kelompok Tani

yang masing – masing menjalankan tugas dan fungsinya. Agar tidak terjadi tumpang tindih antara program pembangunan dimasyarakat maka lembaga yang ada harus memiliki hubungan berkordinasi. Terlebih lagi BKM Sipakainge yang secara nyata memiliki program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan banyaknya program yang sama dengan lembaga lainnya sehingga bisa saling melengkapi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas "Mhm" menjelaskan bahwa

"Ketiga lembaga yang ada di kelurahan Sepee tidak terlalu menemui kesulitan dalam berkoordinasi sebab banyak pengurus dari lembaga tersebut juga merangkap sebagai anggota BKM Sipakainge."

(Wawancara tanggal 26 April 2007)

Hal senada diungkapkan "Skr" bahwa ada beberapa program yang berasal dari BKM yang hampir sama atau sama dengan program dari LKK, sehingga kami menyatukannya untuk diangkat dalam Musrembang.

(Wawancara tanggal 25 April 2007)

"Ahmr" juga mengemukakan

"Program pembangunan fisik BKM Sipakainge salah satunya adalah perbaikan irigasi dan pembuatan jembatan tani adalah salah satu program dari kelompok tani yang sangat kami harapkan dapat terealisasi secepatnya. Alhamdulillah berkat adanya program pembangunan fisik P2KP melalui BKM maka masyarakat khususnya dari kelompok tani dapat mengusulkannya." *(Wawancara tanggal 25 April 2007)*

"Fsl" juga mengemukakan

"Hubungan koordinasi dengan BKM sangat berguna salah satu diantaranya adalah data permasalahan sosial seperti KK miskin dan jompo telah dimanfaatkan oleh BKM sebagai dasar dalam pemberian santunan sosial". (*Wawancara tanggal 25 April 2007*).

Berdasarkan data kelembagaan yang ada pada kelurahan Sepee bahwa tiga lembaga yang ada tersebut ketuanya merangkap anggota BKM Sipakainge yaitu :

1. Kordinator BKM Sipakainge menjabat ketua LKK

2. Dua orang anggota BKM Sipakainge masing-masing menjabat ketua Karang Taruna dan Kelompok Tani.

Berdasarkan wawancara dengan informan dari anggota BKM Sipakainge sekaligus ketua dari lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan Sepee dapat diketahui bahwa BKM Sipakainge dalam berkordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain yang ada di kelurahan Sepee tidak terlalu menemui kesulitan karena adanya anggota BKM Sipakainge yang juga merangkap sebagai pengurus bahkan ketua dari lembaga tersebut. Dengan demikian antara lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan Sepee dengan BKM Sipakainge dapat saling melengkapi dan dapat menyatukan program kerja pembangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menurut rumusan masalah penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge merupakan lembaga yang terbentuk secara aspiratif dan partisipatif karena merupakan keinginan masyarakat berdasarkan pada hasil musyawarah atau rembung masyarakat untuk menilai apakah perlu dibentuk BKM atau memampukan lembaga yang ada sebagai BKM dalam rangka pelaksanaan program pemerintah yaitu penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge Kelurahan Sepee telah mampu menjadi lembaga yang meningkatkan partisipasi masyarakat kelurahan Sepee dalam pembangunan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi yang nampak pada setiap kegiatan yang diadakan oleh BKM Sipakainge khususnya dalam pemamfaatan dana BLM P2KP mulai pada saat pembentukan BKM, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi dan penilaian hasil kegiatan. Hal ini juga dikarenakan BKM Sipakainge keberadaannya telah diketahui dan diterima oleh hampir semua lapisan masyarakat kelurahan Sepee. Meski keberadaannya lebih diartikan oleh

sebagian masyarakat hanya sebatas pengelola dan P2Kp yang dipercayakan kepada BKM Sipakainge namun secara tidak langsung telah membawa masyarakat pada peningkatan partisipasinya dalam pembangunan melalui keterlibatan masyarakat pada setiap pelaksanaan kegiatan BKM Sipakainge. Kemampuan BKM Sipakainge dalam menjalankan perannya sebagai wadah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tampak pada mampunya BKM Sipakainge menggalang solidaritas dan kesatuan sosial masyarakat kelurahan untuk mampu memanfaatkan segenap potensi serta sumber daya yang ada sehingga masyarakat terlibat aktif dan intensif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh BKM Sipakainge bersama masyarakat. Tingkat kehadiran pada setiap rapat, swadaya pembangunan fisik serta masukan informasi sekitar permasalahan sosial (yaitu yang berhak untuk mendapatkan santunan sosial berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan bersama) adalah bukti tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan melalui P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) yang dijalankan oleh BKM Sipakainge bersama masyarakat yang selama ini hal ini jarang ditemui karena berbagai proyek pembangunan yang telah lalu masyarakat tidak dilibatkan secara langsung.

Tingginya motivasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap kegiatan BKM Sipakainge dikarenakan program pembangunan melalui pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) P2KP merupakan keinginan dari masyarakat yang telah disusun bersama dalam suatu proses perencanaan partisipatif dalam penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM) dan

Rencana Tahunan serta Lokakarya. Pelaksanaan program yang terealisasi secara transparansi dan akuntabel serta laporan pelaksanaannya yang mudah diketahui oleh warga baik melalui rapat evaluasi maupun penyebarluasan hasil kegiatan melalui media informasi membawa dampak pada penerimaan hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKM Sipakainge diterima dengan puas dan senang hati oleh masyarakat sehingga kritikan yang bersifat tajam dan langsung ditujukan kepada BKM Sipakainge tidak ada sama sekali.

BKM Sipakainge sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah kelurahan Sepee sebagai fasilitator dalam mendukung prakarsa masyarakat telah menjalin hubungan kordinasi yang baik. Hubungan kordinasi yang tercipta dengan baik antara BKM Sipakainge dengan pemerintah kelurahan Sepee membawa dampak pada kegiatan BKM Sipakainge yang bersinergi dengan pemerintah serta permasalahan yang ditemui oleh BKM Sipakainge dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlalu ditemui berkat kordinasi yang terjalin baik dengan pemerintah kelurahan Sepee.

Menyangkut tentang hubungan BKM Sipakainge dengan lembaga lain yang ada di kelurahan Sepee, BKM Sipakainge dalam berkordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain yang ada di kelurahan Sepee tidak terlalu menemui kesulitan karena adanya anggota BKM Sipakainge yang juga merangkap sebagai pengurus bahkan ketua dari lembaga tersebut. Dengan demikian antara lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan Sepee dengan BKM Sipakainge dapat saling melengkapi dan dapat menyatukan program kerja pembangunan.

B. Saran-Saran

1. Sedapat mungkin setiap pelaksanaan kegiatan BKM Sipakainge melibatkan masyarakat agar BKM Sipakainge benar-benar menjadi wadah atau lembaga yang mampu membawa pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Kegiatan BKM Sipakainge jangan cuma terfokus pada pemamfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP tapi hendaknya dapat lebih diperluas lagi pada kegiatan pembangunan lainnya yang lebih menyentuh pada seluruh segi kehidupan masyarakat.
3. Perlunya tim pemantau independen yang melibatkan instansi perguruan tinggi dalam mengawasi jalannya P2KP untuk lebih mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Beetham, Davit, 1989. *Birokrasi*, Bumi aksara, Jakarta
- Becthold, Kari heinz, 1988. *Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- BKM Sipakainge. 2006. *Profil Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sipakainge*.
- BKM Sipakainge. 2006. *Laporan Pertanggungjawaban Tahunan*.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Depkimpraswil. 2004. *Petunjuk Teknis Pelaksana BKM*. Jakarta.
- Faisal, Sanafiah. 2004. *Format-Format Penelitian*. PT Radja Grafindo Persada. Jakarta.
- Irawan, Prayatsa, 2003. *Logika dan Prosedur Penelitian*, STIA-LAN PRESS, Jakarta.
- Katz, Saul M. 1985, *Modernisasi untuk Pembangunan Nasional*. Bina Aksara. Jakarta.
- Kencana Syafie, Inu, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Resika Aditama Bandung.
- Konsultan Manajemen Wilayah VII Sul-Sel Sul-Bar. 2005. *Petunjuk Teknis BKM dan Perangkat Organisasinya*. Buana Archicon. Makassar
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*. UI.Press. Jakarta.
- DepKimPrasWil. 2004. *Pedoman Umum P2KP*. Tim Persiapan P2KP.
- Obsorn, David dan Peter Plastrik, 2000. *Memangkas Birokrasi*, PPM, Jakarta.
- Rum, Muhammad, 2002. *Dinamika Pembangunan Barru*, LSM Sipurio Barru.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* Refika Aditama. Bandung. 2001
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung

Sogiono, Dr. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Soekanto, Soerjono.2004. *Sosiologi, suatu pengantar*.PT Radja Grafindo Persada.
Jakarta

Soetomo. 1990. *Pembangunan Masyarakat..* Libertry. Yogyakarta.

DOKUMEN - DOKUMEN

Undang-undang republic Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Citra,Umbaran, Jakarta.